

# SINERGI

**Perencanaan dan Pemrograman  
Infrastruktur PUPR di Masa  
Pandemi COVID-19**





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**

# **SIGAP MEMBANGUN NEGERI**



**Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR**  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210  
Email: [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id) Telp. +6221-2751-5802

## **Salam Sinergi** .....

Pembaca yang terhormat

**W**abah Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia, tak menyurutkan semangat tim redaksi untuk tetap menyajikan berbagai informasi dalam Buletin Sinergi Edisi 46 Mei-Juni 2020.

Dampak virus yang menggemparkan seluruh dunia itu akan dibahas pada Topik Utama terutama perubahan apa saja yang terjadi yang dialami Kementerian PUPR seperti dari sisi perencanaan, pemrograman, anggaran, dan realisasi kegiatan.

Pembahasan topik utama tersebut juga diperkuat dari wawancara “Buletin Sinergi” dengan Wakil Koordinator Bidang Kewaspadaan dan Komunikasi, Satgas Penanganan Penyebaran Covid-19 Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja. Beberapa hal yang dibahas dalam wawancara tersebut seperti tujuan dari dibentuknya satgas Covid-19, kegiatan yang dilakukan, dan standar prosedur yang diterapkan terhadap pegawai yang terindikasi dan mengidap Covid-19.

Topik utama ini juga didukung dengan pandangan dari para pakar, salah satunya dari Ahli Perencanaan Wilayah dan Perkotaan, Institut Teknologi Bandung, Sugiyantoro. Dalam rubik tersebut akan dibahas mengenai perubahan yang dilakukan terutama dari sisi perencanaan dan pemrograman infrastruktur terutama saat wabah tersebut melanda tanah air.

Rubrik-rubrik reguler tetap mewarnai buletin edisi ini seperti Kilas Peristiwa, Plesiran, Bidik Lensa, Info Pengembangan Wilayah, Review, dan Sorot. Rubrik lainnya tetap ada yakni Surat Pembaca yang berisi masukan maupun saran dari pembaca Buletin Sinergi.

Kami berharap buletin ini dapat memenuhi harapan pembaca serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

**Pemimpin Redaksi**

# SINERGI

BULETIN BPIW



08

**Wawancara:**  
**Endra S. Atmawidjaja MSc, DEA**  
Kementerian PUPR Bersatu Melawan Covid-19

**Perspektif**  
**Ir. Sugiyantoro, MIP**

Tips dan Trik Perencanaan  
Dalam Masa Pandemi

24

**Warta BPIW:**

Cegah Korupsi, BPIW Tindaklanjuti  
Empat Rekomendasi KPK

13

**Review:**

Menggali Sejarah di Balik  
*The Living Heritage*

32

**Sorot:**

Pembangunan Infrastruktur PUPR pada  
Masa Pandemi Covid-19

34



46

**Sosok**

Sosok Para Pimpinan BPIW  
di Era Struktur Baru

**Tim Penyusun**

**Pengarah:**  
Hadi Sucahyono

**Penanggung Jawab:**  
Iwan Nurwanto

**Penasihat**

Firman H. Napitupulu  
Tris Raditian  
Kuswardono  
Manggas Rudy Siahaan

**Pemimpin Redaksi**  
Hari Suharto Diyaksa

**Redaktur Pelaksana**

Tiara Titi Kartika  
Alis Listalatu

**Staf Editor :**

Hendra Djamal  
Mutri Batul Aini

**Tim Pembuat Artikel:**

Daris Anugrah  
Indira Dwi Kusumatuti  
Tim Kontributor Pemberitaan

**Sekretariat:**

Untung Priyono  
Nur Wahyu

**Diterbitkan oleh:**

Badan Pengembangan  
Infrastruktur Wilayah (BPIW)  
Kementerian PUPR

Edisi 46 | Mei - Juni 2020

# daftar isi



## 4

### Topik Utama:

Perencanaan dan  
Pemrograman Infrastruktur  
PUPR di Masa Pandemi  
Covid-19

**Design Grafis :**  
Heri Hito  
Infografis, layout :  
Ajeng Ayuning Pertiwi  
Cover line art:  
Cut Myra Sukmawati

**Alamat Redaksi:**  
Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com),  
[humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)  
Website: [bpiw.pu.go.id](http://bpiw.pu.go.id)  
No. Telp. +6221-2751-5802

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/ artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
[humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)

# Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Masa Pandemi COVID-19



*Hingga saat ini Covid-19 masih menjadi masalah besar bagi Indonesia, karena jumlah orang dinyatakan positif mengidap penyakit mematikan itu cukup tinggi yakni ratusan ribu orang lebih. Angka ini masih bisa mengalami perubahan. Tidak hanya itu saja, wabah yang mendunia ini turut mengubah kegiatan BPIW terkait perencanaan dan pemrograman infrastruktur sektor PUPR.*



Dalam membuat perencanaan dan pemrograman dibutuhkan data primer dari lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Hal itu juga yang biasa dilakukan BPIW. Akan tetapi di masa pandemi ini, pekerjaan tersebut, sulit dilakukan.

Kejadian tersebut menjadi tantangan tersendiri, mengingat “pabriknya” perencanaan dan pemrograman infrastruktur sektor PUPR ini, mempunyai beberapa pekerjaan yang tengah dikerjakan seperti menyusun *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Danau Toba, Borobudur, Mandalika-Lombok, dan Labuan Bajo.

BPIW juga sedang menangani Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR dan BPIW 2020-2024, program *National Urban Development Project* (NUDP), penyusunan rencana pengembangan 10 wilayah metropolitan di Indonesia, serta program-program lainnya.



Bila data primer sulit didapat, menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono data bisa diperoleh dengan data sekunder yang merupakan data tidak langsung dari objeknya. Data ini didapat melalui sumber lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS bisa didapat melalui internet. Namun bila Pemerintah menerapkan adaptasi dengan kebiasaan baru seiring dilonggarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka survei dapat



Koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/Lembaga juga tidak terganggu di masa pandemi, karena dilakukan melalui *video conference* (vicon)

dilakukan dengan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan banyaknya bencana di Indonesia termasuk bencana non alam seperti Covid-19 ini, maka menurut Hadi, BPIW telah memasukkan tiga variabel kebencanaan dalam konsep perencanaan dan pemrogramannya. Tiga variabel ini adalah *natural disaster* atau bencana alam, *man-made disaster* atau bencana akibat ulah manusia seperti kerusakan hutan dan lingkungan, serta *pandemic disaster* atau bencana non alam yang terjadi di berbagai daerah.

Program ITMP yang sedang disusun juga memuat variabel tersebut, terutama variabel bencana non alam. Dilihat dari sisi penyediaan infrastruktur, menurut Hadi apabila kasus Covid-19 masih ada dan masyarakat diharuskan bekerja di rumah, maka infrastruktur yang dibangun dapat menyesuaikan kondisi tersebut. "Misalkan standar rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perlu diperluas lagi, dari tipe 21 menjadi tipe 36," tutur Hadi.

Koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/Lembaga juga tidak terganggu di masa pandemi, karena dilakukan melalui *video conference* (vicon). Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui vicon tersebut, adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Kegiatan yang dilakukan beberapa waktu lalu itu, diadakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas. Dalam kegiatan ini BPIW ditunjuk sebagai *lead* yang mewakili Kementerian PUPR.

Dalam musyawarah itu BPIW sebagai penasihat narasumber apabila Pemerintah Daerah mengusulkan pembangunan infrastruktur sektor PUPR. "Kita lihat hasil Konsultasi Regional (Konreg), apakah usulan itu masuk dalam hasil Konreg. Kita sudah beberapa kali mengikuti Musrenbangnas, tapi baru kali ini kita sebagai *lead* dan ini merupakan kepercayaan yang diberikan kepada kita," ungkap Hadi. Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Instruksi Menteri

**PERENCANAAN DAN PROGRAM**  
**Infrastruktur Sektor PUPR di Masa Pandemi**

- Program infrastruktur 2021 memadukan input program reguler dari Konreg dan hasil monitoring kondisi yang terus di update.
- Bila wabah ini semakin lama, maka kegiatan reguler bisa berkurang atau berjalan tapi bergeser dari jadwal sebelumnya, ditunda, dan ada yang diubah kegiatan infrastrukturnya.
- Bila kasus Covid-19 masih ada dan diharuskan bekerja di rumah, maka infrastruktur yang dibangun menyesuaikan, misalkan standar rumah untuk MBR diperluas dari tipe 21 menjadi 36.
- Dalam membuat perencanaan dan pemrograman BPIW memasukkan tiga variabel bencana alam, bencana akibat ulah manusia, serta bencana non alam.
- Koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga dilakukan melalui *video conference*.



(Inmen) PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada 27 Maret 2020. Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 tersebut pertama, membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Kedua, menyediakan fasilitas pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Protokol ketiga adalah mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari Covid-19 oleh satuan tugas.

Keempat, mengukur suhu semua orang pada setiap pagi, siang, dan sore yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Kemudian protokol yang kelima adalah membuat kerja sama penanganan *suspect* Covid-19 dengan Rumah Sakit dan Puskesmas setempat yang dilakukan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

Selanjutnya yang keenam, menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar Covid-19 yang dilakukan oleh pengguna dan atau penyedia jasa pekerjaan dan yang ketujuh adan melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana kantor dan lapangan yang dilakukan penyedia jasa dan pekerjaan konstruksi.

Instruksi Menteri PUPR juga menyebutkan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar atau darurat jika teridentifikasi memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran, telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Pimpinan

Kementerian/Lembaga/Instansi/ Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Sebagai langkah pencegahan, BPIW juga melakukan beberapa hal seperti pemeriksaan suhu setiap kali pegawai masuk kantor, penyediaan *hand sanitizer* di beberapa tempat, membuat tambahan berupa sekat plastik di setiap meja pegawai, dan posisi duduk pegawai yang berjarak.

Pemakaian masker juga menjadi wajib dilakukan para pegawai. Tidak hanya itu, secara berkala dilakukan *rapid test* bagi seluruh pegawai dan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan. "Hal ini merupakan kebiasaan baru yang harus diterapkan untuk menjaga kondisi agar tetap sehat dan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Hadi. **(Redaksi)**

Sebagai langkah pencegahan, BPIW juga melakukan beberapa hal seperti pemeriksaan suhu setiap kali pegawai masuk kantor, penyediaan *hand sanitizer* di beberapa tempat, membuat tambahan berupa sekat plastik di setiap meja pegawai, dan posisi duduk pegawai yang berjarak.



# Kementerian PUPR Bersatu Melawan Covid-19

**Endra S. Atmawidjaja MSc, DEA**

.....  
*Wakil Koordinator Bidang Kewaspadaan dan Komunikasi,  
Satgas Pencegahan COVID-19 di Kementerian PUPR*

**P**andemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengakibatkan adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi termasuk dalam pelayanan publik di Kementerian PUPR. Buletin Sinergi BPIW beberapa waktu lalu berkesempatan mewawancarai Wakil Koordinator Bidang Kewaspadaan dan Komunikasi, Satgas Pencegahan COVID-19 di Kementerian PUPR, R. Endra Saleh Atmawidjaja, ST, M.Sc, DEA untuk mengetahui lebih detil apa saja kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kementerian PUPR dan bagaimana belanja infrastruktur dapat membantu mitigasi dampak negatif COVID-19

**Kementerian PUPR telah membentuk Satgas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kementerian PUPR sejak April lalu. Dapat Bapak uraikan urgensi dari Satgas tersebut?**

Kementerian PUPR bergerak cepat dalam upaya pencegahan penyebarluasan COVID-19 baik di lingkungan kerja Kementerian PUPR maupun di sektor Konstruksi. Pada tanggal 16 Maret 2020 diterbitkan Surat Edaran (SE) NO.04/SE/M/2020 yang kemudian disempurnakan melalui terbitnya SE No. 6/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian PUPR penerapan protokol kesehatan, pemberlakuan sistem bekerja di rumah (*Work From Home/WFH*), langkah penanganan apabila ada pegawai yang terpapar dan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa COVID-19.

Selanjutnya pada 2 April 2020 dibentuk Satuan Tugas Penanganan Penyebaran COVID-19 di Kementerian PUPR yang bertugas meningkatkan pencegahan, meminimalisir penyebaran, dan penanganan dampaknya di lingkungan Kementerian PUPR dengan Sekjen sebagai Pengarah dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi sebagai Koordinator. Satgas ini juga membantu Satgas Pencegahan COVID-19 di tingkat nasional.

Upaya pencegahan menjadi prioritas diantaranya dengan melakukan pengurangan jumlah pegawai yang bekerja hingga 50 persen dari kondisi normal dan dilakukan penyekatan meja kerja tiap pegawai dengan memasang akrilik. Kemudian penerapan protokol kesehatan sebelum pegawai masuk gedung kantor dengan melakukan pengecekan suhu tubuh, penyediaan sarana cuci tangan, *hand sanitizer* dan mewajibkan penggunaan masker.

**Kalau misalkan ada kasus positif Covid-19?**

Prosedurnya akan dilakukan *lockdown* pada ruang kantor tersebut selama dua hari untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Kemudian melakukan penelusuran siapa saja yang berhubungan erat dengan orang yang positif, Mereka yang berhubungan dengan yang terpapar Covid-19 harus melakukan *rapid test* atau *swab test*.

**Bagaimana tindak lanjut penanganan kasus positif Covid-19 di Kementerian PUPR?**

Dari laporan yang masuk memang ada kasus pegawai yang positif terpapar Covid-19. Tapi jumlah tidak signifikan dan sudah banyak yang sudah kembali negatif. Angka pegawai Kementerian PUPR yang terpapar Covid-19 kecil. Angkanya tidak terlalu signifikan. Intinya

.....

*Kementerian PUPR bergerak cepat dalam upaya pencegahan penyebarluasan COVID-19 baik di lingkungan kerja Kementerian PUPR maupun di sektor Konstruksi.*

## SURVEI

### Survei Self Assesment Pegawai Kementerian PUPR

Hasil Survei Self Assesment yang diikuti oleh 41.043 pegawai Kementerian PUPR (91,56% dari total pegawai termasuk Konsultan Individu) menemukan bahwa tingkat resiko penyebaran COVID-19 di kementerian PUPR dapat dibagi menjadi 4 (empat) kriteria : tinggi, sedang, rendah, sangat rendah.

No.	Unor	Jumlah Responden	Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
			Peg	%	Peg	%	Peg	%	Peg	%
1.	Sekretariat Jenderal	1,571	5	0,32	57	3,63	155	9,87	1,354	86,19
2.	Inspektorat Jenderal	269	2	0,74	18	6,69	59	21,93	190	70,63
3.	DJ SDA	10,559	10	0,09	171	1,62	528	5,00	9,850	93,29
4.	DJ Bina Marga	16,459	24	0,15	268	1,63	846	5,14	15,321	93,09
5.	DJ Cipta Karya	7,018	9	0,13	147	2,09	518	7,38	6,344	90,40
6.	DJ Perumahan	934	3	0,32	46	4,93	127	13,60	758	81,16
7.	DJ Bina Konstruksi	1,103	8	0,73	81	7,34	130	11,79	884	80,15
8.	DJ Pembiayaan Infrastruktur PUPR	443	1	0,23	25	5,64	71	16,03	346	78,10
9.	BPIW	330	2	0,61	28	8,48	68	20,61	232	70,30
10.	Balitsbang	1,228	4	0,33	46	3,75	116	9,45	1,062	86,48
11.	BPSDM	975	5	0,51	25	2,56	94	9,64	851	87,28
12.	BPJT	66	0	0,00	4	6,06	11	16,67	51	77,27
13.	BPPSPAM	88	1	1,14	6	6,82	10	11,36	71	80,68
	TOTAL	41,043	74	0,18	922	2,25	2,734	6,66	37,313	90,91

#### CATATAN

Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kementerian PUPR, Laporan Pemetaan Potensi Penyebaran COVID-19 di Kementerian PUPR

Sebagai tindak lanjut dari Survei yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2020 – 24 April 2020 tersebut, Satgas telah melakukan konfirmasi terhadap pegawai yang masuk dalam kategori risiko tinggi dan seluruh pegawai dalam kondisi sehat dan tidak mengalami keluhan terkait COVID-19.

Survei yang dilakukan secara online ini cukup tinggi angka partisipasinya diikuti 41.043 pegawai Kementerian PUPR.

kita berharap para pegawai Kementerian PUPR selalu menjaga imunitas tubuh agar tidak bisa terpapar Covid-19.

#### Langkah strategis apa lagi yang dilakukan untuk penanganan penyebaran Covid-19 di Kementerian PUPR?

Kementerian PUPR telah menyelenggarakan dua Survei. Pertama, Survei Self Assesment Pegawai Kementerian PUPR, survei ini untuk mengetahui tingkat kerentanan terpapar dari setiap pegawai PUPR. Survei yang dilakukan secara online ini cukup tinggi angka partisipasinya diikuti 41.043 pegawai Kementerian PUPR.

Angka itu 91,56 persen dari total pegawai termasuk Konsultan Individu. Survei pertama dilakukan pada pertengahan Maret sampai akhir April. Dengan adanya survei ini kita menjadi mengetahui staf mana yang berada dalam resiko tinggi dan harus langsung swab test, resiko sedang, resiko rendah dan sangat rendah.

Survei ini membagi empat kriteria kerentanan pegawai. Kedua, Survei Persepsi dan Kepatuhan Pegawai. Ini sifatnya hanya untuk mengetahui pemahaman perilaku pegawai terhadap social distancing (jarak sosial) serta pemakaian masker. Kemudian, Informasi yang dikonsumsi, karena salah satu indikator bahwa kita punya daya tahan yang baik terhadap Covid-19 kalau kita tidak stres. Salah satu sumber stres ini bisa dari pemberitaan dan informasi yang beredar. Survei ini angka partisipasinya tidak setinggi yang pertama atau hanya diikuti partisipan 72 persen. Tapi masih relatif dapat mengetahui kerentanan pegawai dari persepsi dan kepatuhan terhadap social distancing.

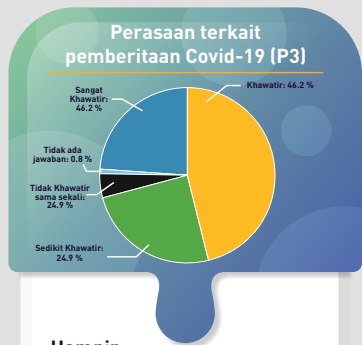
#### Selain survei langkah apa lagi?

Kita memberlakukan kebijakan setiap bulan minimal melakukan satu kali rapid test. Itu berlaku bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Setiap pegawai harus mengikuti

## SURVEI

### Survei Persepsi dan Kepatuhan Pegawai

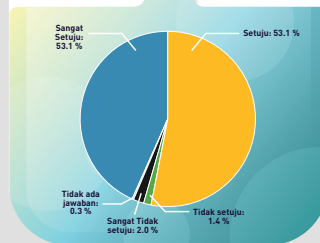
Hasil Survei Persepsi dan Kepatuhan Pegawai dalam pelaksanaan Protokol Covid-19 yang diikuti oleh 30.685 pegawai Kementerian PUPR (71,5% dari total pegawai) menemukan hal-hal sebagai berikut:



Hampir **95%** responden mengalami kekhawatiran terkait pemberitaan COVID-19

### Perasaan terkait pemberitaan Covid-19 (P3)

Sekitar **96%** responden memahami pentingnya social/physical distancing pada saat pandemi COVID-19



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kementerian PUPR, Laporan Mingguan Jumat, 29 Mei 2020

*rapid test* untuk dapat diketahui kondisinya itu reaktif atau non reaktif.

Bagi yang reaktif langsung dirujuk untuk melakukan swab tesnya. Kemudian, kalau melakukan perjalanan dinas secara otomatis harus melakukan *rapid test* di Bandara misalnya. Sepulang perjalanan dinas tergantung sifatnya, kalau perjalanan tersebut dianggap memiliki resiko tinggi terpapar selama perjalanan harus menjalani *rapid test* atau swab tes walau tidak ada gejala apapun. Nah, kalau hasilnya non reaktif atau negatif bisa kembali ke kantor, tapi kalau ternyata positif berarti harus melakukan isolasi mandiri atau perawatan tergantung kondisi kesehatannya.

#### **Bagaimana keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di tengah Pandemi COVID-19?**

Pada prinsipnya proyek konstruksi tetap berjalan baik, yaitu pada proyek-proyek APBN maupun investasi tanpa ada kasus COVID-19, seperti Pembangunan RS Pulau Galang, RS Akademik UGM,

RS Lamongan, Wisma Atlet, Tol Layang A.P. Pettarani Makassar, dan Tol Kayu Agung-Palembang. Satu proyek yang dihentikan sementara yakni ruas Tol Serang-Panimbang namun sudah dilanjutkan kembali.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada masa Pandemi COVID-19 memperhatikan Instruksi Menteri No.2/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang dikeluarkan pada 27 Maret 2020. Inmen ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara aman, efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Inmen tersebut mengatur bahwa setiap proyek infrastruktur harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mengatur prosedur penanganan apabila terjadi kasus positif/terkonfirmasi COVID-19 pada proyek konstruksi.

*Inmen No.2/IN/M/2020 memastikan penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara aman, efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.*

Mitigasi dampak COVID-19 dilakukan Kementerian PUPR melalui Program Padat Karya Tunai yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan mendistribusikan penghasilan hingga ke pedesaan.



Pelaksanaan Rapid Tes bakal dilakukan rutin setiap bulan.

Sumber: BPIW

Selain itu, pada masa Pandemi COVID-19 Kementerian PUPR tetap berkomitmen menjaga pelayanan infrastruktur dasar, seperti jalur logistik pada jalan nasional maupun jalan tol tetap dalam kondisi baik, terutama saat terjadi bencana alam tanah longsor yang menutup badan jalan, diupayakan segera bisa kembali bisa dilalui. Kelancaran konektivitas juga akan mendukung mobilitas tugas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan angkutan logistik kesehatan maupun ambulan. Selain itu Kementerian PUPR menjaga ketersediaan air di tampungan air sebagai sumber air baku dan pangan terutama di daerah rawan air seperti di Provinsi NTT dan NTB.

#### **Peran Kementerian PUPR dalam Mitigasi Dampak COVID-19 secara nasional?**

Pada masa Pandemi COVID-19, investasi dan ekspor mengalami penurunan, sehingga belanja Pemerintah melalui APBN dan APBD yang diharapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui belanja infrastruktur di Kementerian PUPR.

Mitigasi dampak COVID-19 dilakukan Kementerian PUPR melalui Program

Padat Karya Tunai yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan mendistribusikan penghasilan hingga ke pedesaan. Program Padat Karya Tunai, terdiri dari 16 kegiatan dengan total penerima manfaat 639.990 orang dengan anggaran Rp 12,3 Triliun. Progres pelaksanaannya hingga Agustus 2020 telah mencapai 58,14 persen dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 7,16 Triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 402.449 orang. **(Daris/BPIW)**



## Cegah Korupsi, BPIW Tindaklanjuti Empat Rekomendasi KPK

**K**orupsi merupakan kejahatan yang menggerogoti uang negara. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan instansi terkait, salah satunya dengan BPIW Kementerian PUPR. Pencegahan dilakukan KPK mulai dari proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab BPIW. Empat rekomendasi telah dikeluarkan KPK dan telah direspon BPIW dengan membuat rencana aksi yang sebagian besar telah dilaksanakan.

**4 REKOMENDASI KPK**  
**yang Ditindaklanjuti BPIW**

**INFO TER-UPDATE**

1. Penyusunan Regulasi yang Mengatur Proses Perencanaan Pemograman dan Penganggaran.
2. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penyusunan Program Tahunan.
3. Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR Berbasis Pengembangan Wilayah.
4. Perkuatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Efektifitas Tata Kelola Organisasi.

Sebagai lembaga negara yang diberikan tanggung jawab untuk menyelamatkan uang negara, KPK terus mengawasi setiap kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mencegah terjadinya korupsi. Sebagai bagian dari pencegahan tersebut, KPK memberikan empat rekomendasi yang ditindaklanjuti BPIW dengan membuat beberapa rencana aksi.

Beberapa pertemuan secara berkala, melalui *video conference* (vicon) bertajuk “Monitoring Implementasi Rencana Aksi Kajian Perencanaan dan Pembangunan”, dilakukan BPIW dan KPK.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Suahyono menegaskan bahwa BPIW berkomitmen untuk melaksanakan empat rekomendasi KPK. Langkah ini dilakukan untuk ikut dalam upaya pencegahan korupsi. “Kami terus bekerja untuk

menuntaskan empat rekomendasi KPK,” tegas Hadi.

Perwakilan dari KPK Didik Mulyanto menambahkan perencanaan mempunyai peran yang penting untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dari awal perencanaan. Reorganisasi di BPIW diharapkan dapat memberi dampak positif, terutama dengan hadirnya Bidang Kepatuhan Intern.

Staf Khusus Menteri PUPR, Binsar Simanjuntak, menilai peran BPIW sangat strategis. Untuk itu ia meminta agar BPIW dapat mempertahankan kualitasnya. “Unit baru yang ada di BPIW merupakan wujud nyata perhatian Pak Menteri terhadap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR,” ucapnya.

Empat rekomendasi KPK yang harus ditindaklanjuti BPIW yakni pertama, Penyusunan Regulasi yang Mengatur Proses Perencanaan Pemograman dan Penganggaran. Guna melaksanakan rekomendasi itu, BPIW telah membuat rencana aksi yang sedang dilakukan yakni Penyusunan dan legalisasi Pedoman Perencanaan dan Pemograman Infrastruktur PUPR. *Output* dari rencana aksi ini berupa Peraturan Menteri/ Surat Edaran.

Rekomendasi kedua yakni, Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penyusunan Program Tahunan. Dalam rekomendasi ini rencana aksinya berupa Perkuatan Sistem Informasi Pemograman (SIPro) untuk mendukung proses perencanaan dan pemograman. Rencana aksi ini sudah dilakukan. *Output* dari kegiatan ini SIPro terkoneksi dengan Sistem Informasi Pemograman unit organisasi dan tersedianya data *Master Plan* dalam SIPro.

*Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Suahyono menegaskan bahwa BPIW berkomitmen untuk melaksanakan empat rekomendasi KPK.*



Dalam rekomendasi yang kedua ini juga terdapat rencana aksi berupa Perkuatan Mekanisme dan hasil Konsultasi Regional (Konreg) serta penajaman program hasil Konreg. *Output* yang dihasilkan berupa Laporan Hasil Konreg yang ditandatangani Eselon I dan Dokumen penajaman hasil Konreg.

Rekomendasi KPK yang ketiga adalah Penyusunan *Master Plan* Pembangunan Infrastruktur PUPR Berbasis Pengembangan Wilayah. Pada rekomendasi ini, rencana aksinya berupa Penyusunan Pedoman Standarisasi Penyusunan *Master Plan* Pembangunan infrastruktur PUPR Berbasis Wilayah. *Output* dari rencana aksi ini adalah Surat Edaran terkait Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Rencana aksi lainnya berupa *review* atas dua dokumen *Master Plan* Pengembangan Wilayah yakni Kota Tanjung Selor dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Kemudian, BPIW juga menyusun dua dokumen

*Master Plan* Pengembangan Wilayah di Kota Jayapura dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok. Dari rencana aksi ini, *output* yang dihasilkan berupa Dokumen *Master Plan* Kawasan yang telah tersusun dan *ter-review*.

Rekomendasi yang keempat adalah perkuatan sumber daya manusia dan peningkatan efektifitas tata kelola organisasi. Pada rekomendasi yang keempat ini, ada dua rencana aksi yakni pertama perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari kegiatan itu, *outputnya* adalah Sumber Daya Manusia (SDM), peta jabatan dan peningkatan kapasitas SDM.

Rencana aksi yang kedua adalah Penguatan kelembagaan BPIW. *Outputnya* berupa Dokumen Evaluasi Kelembagaan BPIW 2015 – 2019. *Output* lainnya adalah Dokumen Naskah Akademis Kelembagaan BPIW 2020 – 2024. Kedua rencana aksi ini telah dilaksanakan dengan regulasi yang ada.

Pelaksanaan rencana aksi dimonitor Bidang Kepatuhan Intern. Dengan langkah-langkah yang dilakukan BPIW tersebut diharapkan dapat membantu KPK dalam mencegah korupsi mulai dari perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR. **(Redaksi)**

.....  
*Kedua rencana aksi ini telah dilaksanakan dengan regulasi yang ada. Pelaksanaan rencana aksi dimonitor Bidang Kepatuhan Intern. Dengan langkah-langkah yang dilakukan BPIW tersebut diharapkan dapat membantu KPK dalam mencegah korupsi mulai dari awal proses pembangunan infrastruktur sektor PUPR*

**2 RENCANA AKSI BPIW**  
**Terkait Rekomendasi KPK yang Keempat**  
*(Perkuatan SDM dan Peningkatan Efektifitas Tata Kelola Organisasi)*

**INFO TER-UPDATE**

- 1. Perkuatan SDM**  
Output : SDM, Peta Jabatan dan Peningkatan kapasitas SDM.
- 2. Penguatan kelembagaan BPIW**  
Output :
  - a. Dokumen Evaluasi Kelembagaan BPIW 2015 – 2019
  - b. Dokumen Naskah Akademis Kelembagaan BPIW 2020 – 2024.

# Dukungan Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur PUPR di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) untuk Meningkatkan Logistik dan Ekonomi Nasional di Wilayah Kalimantan

*Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. KEK Maloy berada pada wilayah administrasi Kecamatan Kaliorang. Kawasan Maloy ditetapkan sebagai KEK berdasarkan PP No. 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.*

*Penetapan kawasan ekonomi khusus diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta mengurangi disparitas ekonomi Indonesia.*

*Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2019 lalu menyusun acuan bagi keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur strategis pada kawasan KEK MBTK beserta wilayah pengaruh di sekitarnya.*



Kantor administrasi KEK MBTK

Sumber: BPIW

## Profil Singkat KEK MBTK

KEK MBTK yang saat ini menjadi satu-satunya KEK di Pulau Kalimantan disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2014. Kawasan ini berpengaruh erat terhadap pengembangan wilayah di Kab. Kutai Timur dan ditargetkan beroperasi pada Oktober 2018 (setelah diperpanjang satu tahun). Kegiatan utama pada KEK MBTK adalah:

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
- b. Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- c. Industri Pengolahan Kayu
- d. Industri Energi
- e. Logistik
- f. Penyediaan Infrastruktur Kawasan

Perkiraan investasi pembangunan kawasan KEK seluas 557,34 hektar ini sekitar 3,4 Triliun Rupiah, sementara investasi pelaku usaha diperkirakan mencapai 34,31 Triliun Rupiah. Kegiatan industri dan logistik di KEK MBTK ditargetkan mampu menyerap 55.700 tenaga kerja dan secara ekonomi mampu meningkatkan PDRB Kab. Kutai Timur hingga 4,67 Triliun Rupiah pada tahun 2025.

## Kondisi Fisik Kawasan

Secara fisik dan lingkungan, KEK MBTK memiliki kondisi yang sesuai untuk kegiatan industri. Hal ini terlihat dari kondisi kemiringan lereng di lokasi KEK cenderung rendah sehingga tidak ada kendala dalam pematangan lahan. Keadaan topografi di KEK juga tergolong datar.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di KEK MBTK masuk kategori tinggi-sangat tinggi, namun dalam pembangunan diarahkan untuk tetap melakukan pemeliharaan ekosistem yang ada dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui infrastruktur yang ramah lingkungan.

Dari segi kebencanaan, Kabupaten Kutai Timur memiliki kerentanan gerakan tanah rendah dan sangat rendah untuk daerah pesisir. Artinya pada zona ini jarang terjadi kejadian gerakan tanah, jika terjadi maka hanya terjadi pada area yang tidak terlalu luas. Untuk kerawanan terhadap bencana gempa bumi berada pada tingkat menengah, dengan potensi terlanda guncangan gempa bumi dengan skala intensitas VII-VIII MMI. Untuk kejadian retakan tanah, likuifaksi, longsor pada topografi perbukitan, dan pergeseran tanah berpotensi terjadi pada dimensi kecil. Risiko bencana banjir pada Kabupaten Kutai Timur berada pada tingkat sedang. Sementara



Gerbang KEK MBTK

Sumber: BPIW

Kecamatan Kaliurang memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang tinggi.

## Dukungan Infrastruktur untuk KEK MBTK dan Sekitarnya

Pada tahun 2018 KEK MBTK selesai membangun fasilitas sisi darat pelabuhan CPO MBTK, Jalan Akses Menuju Kawasan Industri MBTK, Jaringan Transmisi Sistem Sekerat, SPAM MBTK, dan *Trestle* CPO.

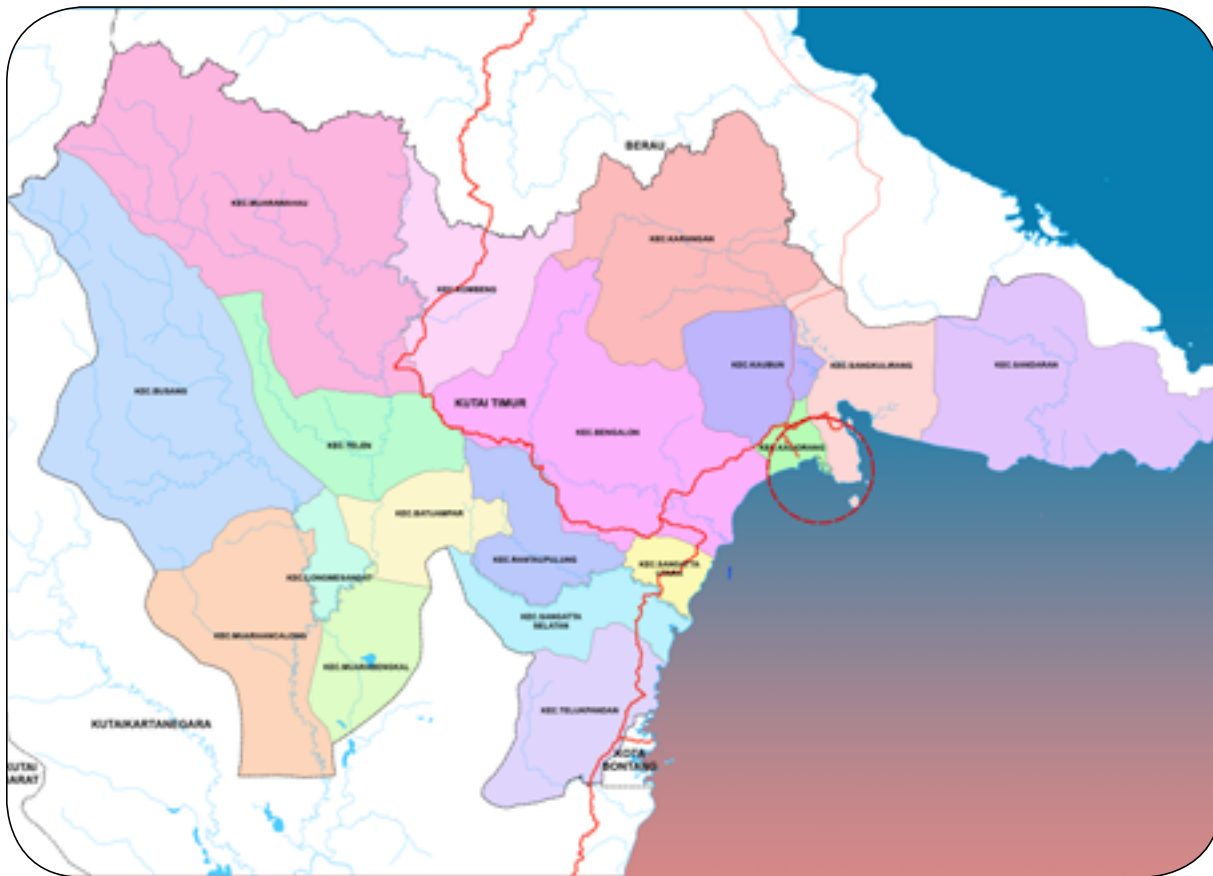
Tahun 2019 untuk mendukung konektivitas KEK dilakukan pembangunan dermaga pelabuhan *multipurpose*, Peningkatan Jalan Nasional menuju KEK MBTK (Samarinda – Bontang – Sangatta – Sp. Perdau – Bengalon – MBTK – Sangkulirang – Batu Lepok), dan Peningkatan jalan Sangatta – Sp. Perdau – Batu Ampar – Muara Wahau.

Sementara rencana pembangunan/ pengembangan ke depannya antara lain: pembangunan jalan dalam Kawasan MBTK, Tanki Timbun CPO, Jalur Kereta Api Tabang – MBTK, Jalan Bontang – Sangatta, Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Timur, IPAL dalam kawasan kapasitas 26672 m<sup>3</sup>/hari. Keseluruhan program ini akan dilakukan bertahap dalam 5 tahun hingga KEK siap beroperasi.

## Profil dan Demand Assesment Infrastruktur PUPR

### A. Infrastruktur SDA

Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Mahakam (wewenang nasional) dan WS Karangan (lintas Kabupaten/Kota - wewenang provinsi). Untuk KEK MBTK masuk dalam WS Karangan. Pemenuhan kebutuhan air baku lokasi



Peta KEK MBTK

Sumber: BPIW

KEK MBTK memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mangkaray dengan potensi sebagai berikut:

1. Sumber air Gunung Sekerat (debit 1.000 Lt/dt), dengan perpipaan sepanjang 20,16 km,
2. Sumber air Sungai Kaliorang (debit 200 Lt/dt), dengan perpipaan sepanjang 20,99 km,
3. Sumber air Selangkau (debit 1.039 Lt/dt), dengan perpipaan sepanjang 10,85 km.

Kebutuhan air bersih KEK MBTK hingga beroperasi penuh adalah 40 ribu m<sup>3</sup>/hari. Sedangkan kebutuhan air bersih permukiman penduduk diasumsikan 130 Lt/dt/hari. Kebutuhan air ini didukung dengan adanya 5 bendung di Kab. Kutai Timur yang menjadi wewenang pusat, dan 5 bendung dalam wewenang provinsi.

#### B. Infrastruktur Bina Marga

Konektivitas di sekitar KEK MBTK didukung dengan adanya infrastruktur jalan nasional sebagai berikut:

1. Pelabuhan MBTK Baru ke KEK MBTK: Ruas 035 Akses Pelabuhan MBTK – Ruas 018 Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan MBTK (MBTK),

2. PKW Sangata ke KEK MBTK: Ruas 015 Sangata – Sp. Perdau – Ruas 015 (k) Jl. Yos Sudarso – Ruas 016 Sp. Perdau – Muara Lembak – Ruas 017 Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang) – Ruas 018,
3. Kota Bontang ke KEK MBTK: Ruas 014 Bontang – Sangata – Ruas 015 – Ruas 016 – Ruas 017 – Ruas 018.

#### C. Infrastruktur Permukiman

Kabupaten Kutai Timur termasuk kabupaten rawan air dan sanitasi sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak. Pertumbuhan jumlah penduduk yang diiringi masuknya pekerja KEK berdampak pada meningkatnya produksi sampah di Kutai Timur hingga mencapai 2.475 m<sup>3</sup>/hari. Hingga saat ini, sarana persampahan yang tersedia terbatas dilayani oleh TPA Sangatta seluas 14 Ha. Tingginya produksi sampah hingga saat ini menyebabkan TPA Sangatta mengalami *overload* walaupun telah ditopang dengan keberadaan TPS alternatif (di Kobo Jaya dan di Kanal III Jalan AW Syahrani). Ke depan, kebutuhan peningkatan kapasitas maupun



# KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN)



## ISU STRATEGIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

### Isu Pengembangan Wilayah

- Luas kawasan : **557,34 Ha**
- Kawasan Ekonomi Khusus MBTK masuk dalam **WPS 23 Balikpapan – Samarinda – Maloy** (Analisis BPIW, 2016)
- KEK MBTK telah ditetapkan **dalam PP No. 85 Tahun 2016**
- KEK MBTK diproyeksikan **menarik investasi sebesar Rp. 34,3T** dan dapat menyerap **55.700 tenaga kerja** hingga tahun 2025
- KEK MBTK memiliki **kegiatan utama industri pengolahan kelapa sawit dan pengolahan kayu**

### Isu Pengembangan Sektor Infrastruktur

- Keterbatasan TPA Sangatta** di Kutai Timur untuk menampung proyeksi peningkatan timbunan sampah akibat operasi- nalisasi KEK
- Belum terdapat **Rumah Susun** untuk pekerja industri di KEK MBTK.
- Kabupaten Kutai Timur memiliki indeks **rawan bencana tinggi untuk banjir**
- Kab Kutai Timur **termasuk dalam Kab/Kota rawan air dan sanitasi**

### Arahan Indikasi Program

- Pembangunan TPST** dan **Optimalisasi TPA** Sangatta di Kutai Timur
- Pembangunan **rumah susun** pekerja KEK
- Pembangunan **sarana dan prasarana** untuk mitigasi bencana
- Penyediaan air bersih dan infrastruktur** dasar sesuai SPM

## 12 Ultimate Kawasan



- Perumahan Permukiman**
  - Kemudahan akses air bersih terpenuhi
  - Penanganan sampah yang optimal
  - Akses rumah layak huni bagi penduduk dan pekerja
  - peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar dan sanitasi (pengolahan limbah)
- Pengendalian Bencana**
  - Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kek maloy
  - Pengembangan infrastruktur tahan bencana
- Jalan**
  - Kondisi jalan nasional sebagai jalur utama dalam kondisi jalan yang mantap dan berkeselamatan
  - Dukungan jalan daerah untuk mendukung konektivitas bahan baku dan pusat pengolahan di kek maloy
- SDA**
  - Pengembangan sistem air baku permukaan
  - Pengendalian tutupan lahan pada daerah tangkapan air

## 13 INDIKASI PROGRAM (TH 2020-2024)

### Kebutuhan Penanganan Bidang SDA

- Pembangunan bendung Sungai Mangenay untuk penanggulangan banjir (1 buah)
- Pembangunan intake untuk SPAM IKK Sangkulirang (1 buah)
- Pemeliharaan dan Optimalisasi DI Kaubun (1 kawasan)
- Pemeliharaan dan Optimalisasi DI Pesap (1 kawasan)
- Pemeliharaan dan Optimalisasi DI Tanah Abang (1 kawasan)
- Pemeliharaan dan Optimalisasi DI Muara Bangun (1 kawasan)
- Pembangunan Embung pengendali banjir di Maloy (1 buah)

### Kebutuhan Penanganan Bidang Jalan

- Rehabilitasi Jalan ruas 017. Muara Lembak - Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang) (61,43 km)
- Rehabilitasi Jalan ruas 035. Akses Pelabuhan Maloy (16,67 km)
- Rehabilitasi Jalan ruas 019. Sp.Perdau - Batu Ampar (94,41 km)

### Kebutuhan Penanganan Bidang Perumahan

- Pembangunan rusunawa pekerja industry tahun 2024-2029 (1 tower)
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2024-2029 (1 kab)

### Kebutuhan Penanganan Bidang Permukiman

- Pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Sangkulirang (10lt/dtk)
- Penataan Kawasan KEK Maloy tahun 2024-2029 (1 kws)
- Optimalisasi TPA Sangatta tahun 2024-2029 (1 kws)
- Pembangunan TPS3R Sangkulirang (1 unit)
- Optimalisasi SPAM di kawasan rawan air (1 kab)
- Pembangunan drainase kawasan (1 kws)
- Pembangunan IPLT Kec. Sangkulirang(1 kws)



Gerbang KEK MBTK

Sumber: BPIW

pembangunan TPA menggantikan TPA Sangatta yang *overload* menjadi penting diiringi dengan beroperasinya industri pengolahan turunan sawit di KEK MBTK.

#### D. Infrastruktur Perumahan

Kebutuhan penyediaan perumahan diidentifikasi dari besaran *backlog* rumah di sekitar KEK MBTK berdasarkan kepemilikan yaitu sebesar 4.509 KK. Sedangkan berdasarkan penghunian terdapat 1.277 KK. Kebutuhan perbaikan kualitas hunian juga diperlukan untuk mengentaskan keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sekitar KEK yang mencapai 6.474 RTLH. Untuk mendukung aktivitas KEK, pemenuhan kebutuhan hunian untuk pekerja industri dan pekerja dari luar Kabupaten Kutai Timur diidentifikasi akan dibutuhkan hunian sebanyak 12.442 unit.

(Disarikan oleh: Mutri **Batul Aini**)

.....

*Keterbatasan TPA Sangatta di Kabupaten Kutai Timur seluas 14 ha, mengakibatkan perlunya peningkatan kapasitas/pembangunan TPA di Kabupaten Kutai Timur*

.....

# BERBAGI PERAN ANTARA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

## MANDAT PRESIDEN



**“Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar Lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah!”**

### Sinta Nur Aini

*Jafung Perencana Ahli Madya,  
Pusat Pengembangan Infrastruktur  
Wilayah Nasional*

### Latar Belakang

Mandat Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Reformasi Struktural Kelembagaan Pemerintah pada Tahun 2019 mulai ditindaklanjuti setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang merupakan pedoman untuk struktur organisasi Kementerian. Berbagai Kementerian/Lembaga mulai menyederhanakan eselonisasi birokrasi menjadi 2 (dua) level (yaitu Eselon I dan Eselon II) serta mengalihkan jabatan struktural eselon III ke bawah kedalam jabatan fungsional, yang menghargai keahlian dan kompetensi.

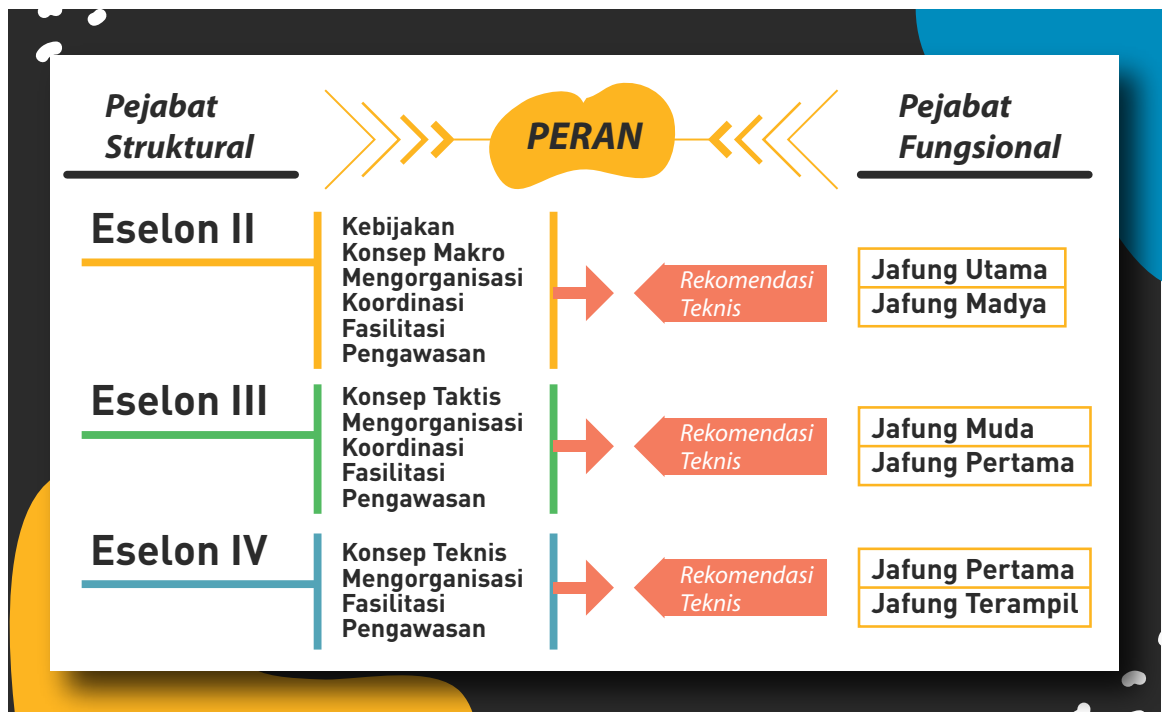
Kementerian PAN dan RB kemudian mengesahkan Permen PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, yang meliputi jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV), dan pelaksana (eselon V). Permen PAN dan RB inilah yang menjadi dasar Kementerian/Lembaga melakukan reformasi struktural.

### Bagaimana Peran Jabatan Fungsional dalam Sebuah Organisasi Pemerintahan?

Dalam sebuah organisasi pemerintahan, Jabatan Fungsional berbagi peran dengan Jabatan Struktural. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pengelompokan Jabatan Fungsional (JF), tugas dan fungsi dalam setiap jenjang JF (Utama, Madya, Muda, Pertama, dan Terampil), Kriteria, dan Akuntabilitasnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. UU dan PP ini merupakan landasan hukum berbagi peran antara Jabatan Struktural dengan Jabatan Jabatan Fungsional.

Tujuan pembagian peran ini adalah: 1) menyeimbangkan tugas dan fungsi antara Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana; 2) mempertegas tugas dan fungsi antara Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana; 3) mengoptimalkan peran Jabatan Fungsional sebagai *expert of task*; 4) mengembalikan posisi Jabatan Fungsional di level yang disetarakan dengan Jabatan Struktural. Ketentuan konsep berbagi peran antara Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dapat digambarkan dalam bagan/skema berikut ini.

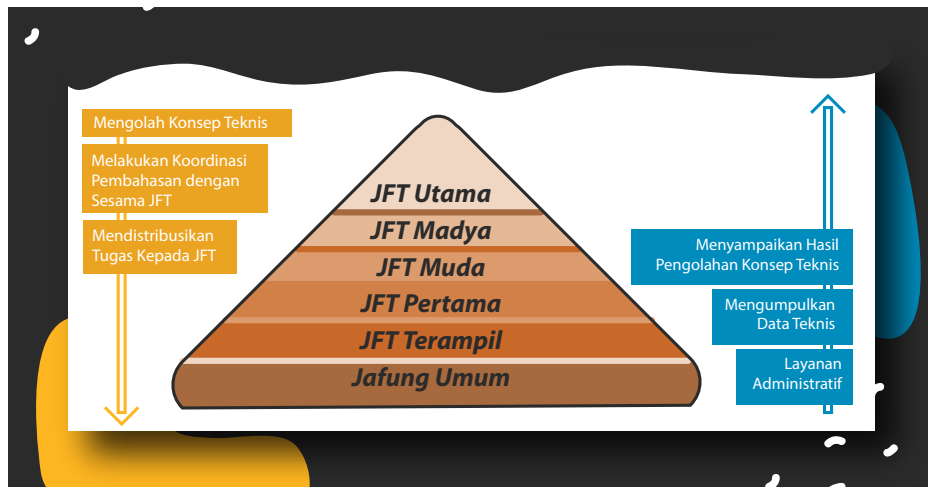
### KETENTUAN KONSEP BAGI PERAN





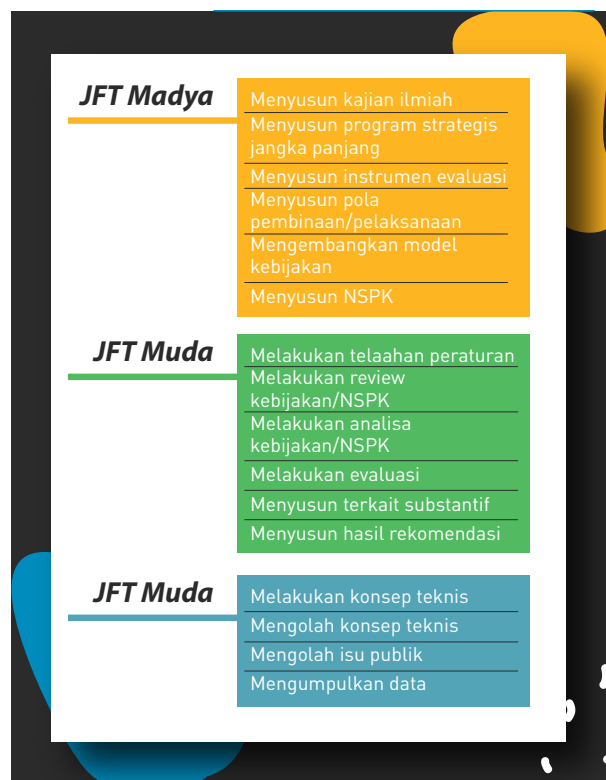
Dukungan manajemen yang diberikan oleh Jabatan Fungsional Teknis (JFT) sesuai dengan jenjangnya (Utama, Madya, Muda, Pertama, dan Terampil) adalah mengikuti mekanisme seperti dalam gambar berikut ini.

## MEKANISME DUKUNGAN MANAJEMEN PEJABAT FUNGSIONAL



Kedudukan Jabatan Fungsional Teknis (JFT) menuntut adanya kinerja sesuai dengan keahlian dan kompetensi JFT tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh JFT sesuai perannya dalam sebuah organisasi pemerintahan, berdasarkan jenjangnya, dapat diilustrasikan sebagai berikut.

## STRUKTUR KINERJA BAGI PERAN



” Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.”



(Sinta/BPIW)



# Tips dan Trik Perencanaan Dalam Masa Pandemi

**Ir. Sugiyantoro, MIP**

Ahli Perencanaan Wilayah dan Perkotaan,  
Institut Teknologi Bandung

Pandemi telah mengubah pola kehidupan masyarakat secara drastis. Sistem relasi sosial-ekonomi dan kegiatan pemerintahan tiba-tiba seperti *shut-down*, berhenti, akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan pengurangan kegiatan perkantoran agar bekerja di rumah, *working from home* (WFH) menjadi solusi.

Situasi di atas bukan tanpa pengorbanan dari sisi sosial-ekonomi. Banyak perusahaan tidak sanggup membayar gaji karyawan, banyak perusahaan tutup, dan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga melanda hampir seluruh negara di dunia. Sudah banyak negara maju mengalami resesi, seperti Jerman, Jepang, Swedia, dan Inggris. Negara-negara lain di ASEAN juga menyusul, yaitu Singapura, Malaysia, dan bahkan dikhawatirkan negara kita.

Sebuah model bekerja yang baru harus dikembangkan, dan bukan sekedar slogan WFH. Negara ini sangat membutuhkan berbagai inovasi dan terobosan serta kreativitas untuk menciptakan model bekerja yang baru, tanpa perlu mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Dalam sistem operasi administrasi pemerintahan

nasional, ini juga menjadi tantangan yang masih harus dipecahkan. Karena terbukti bahwa setelah dilakukannya pelonggaran PSBB pada akhir Juni 2020, banyak pejabat dan aparat pemerintahan menjadi korban Covid-19. Hal ini menjadi sebuah kehilangan besar dan secara strategis mengganggu keseimbangan sumber daya manusia (SDM) berbakat. Namun, sebagai bangsa pejuang, kegiatan pemerintahan harus tetap berjalan. Demikian pula kegiatan perencanaan di lingkungan Kementerian PUPR khususnya BPIW, harus tetap berjalan secara *innovative* dan *creative*.

Kegiatan perencanaan di lingkungan BPIW membutuhkan tiga komponen dasar, yaitu model *desk study*, model visitasi atau kunjungan lapangan, dan model diskusi (khususnya lintas lembaga). Model *desk study* sebenarnya adalah model yang paling mudah, karena dapat dilakukan di mana saja, tetapi mempunyai kendala mengenai akses terhadap sumber data. Definisi akses yang mudah membutuhkan sinergi *online* antarsumber data. Artinya pada saat periode *desk study* dilaksanakan, sebenarnya separuh pekerjaan perencanaan seharusnya sudah dapat dipenuhi (*covered*).

Model visitasi atau kunjungan lapangan adalah sebuah kebutuhan bagi para perencana untuk meninjau langsung situasi lapangan. Kegiatan ini sekaligus untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung di lapangan. Metode yang digunakan beragam, baik secara primer maupun sekunder.

Metode pencarian data secara primer dapat dilakukan antara lain melalui wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi. Secara sekunder, pencarian data adalah dengan berkunjung langsung untuk mendapatkan data yang tercatat di lembaga-lembaga daerah maupun lembaga nasional yang berkedudukan di daerah.

Model diskusi adalah pelaksanaan kegiatan diskusi, baik berupa seminar maupun *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan baik di pusat maupun daerah. Kegiatan ini menjadi sarana untuk bertukar data dan informasi secara langsung, serta memecahkan persoalan secara bersama. Kadang FGD menjadi sarana untuk memutuskan secara kolektif antarlembaga terkait.

Ketiga model dasar tadi menjadi pondasi untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan *platform* atau rencana kerja baru dalam kegiatan perencanaan. Berikut ini disampaikan beberapa pembelajaran, atau semacam tips dan *tricks* yang sangat mungkin dapat diterapkan dalam proses kegiatan perencanaan di lingkungan BPIW, yaitu: (i) *online data perencanaan harus ready*; (ii) kunjungan lapangan dapat diwakili melalui media gratis yaitu *Google Street* dan *Google Map*; (iii) wawancara dapat dilakukan via berbagai aplikasi *video conference*; (iv) penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara *online* misal via *Google Forms* atau *Microsoft Forms*; dan (v) seminar, FGD, dan diskusi secara umum dapat dilakukan secara webinar dengan *video conference*.

**(i) Online data perencanaan harus ready**

Sistem ini mempunyai implikasi yang sangat besar mengenai kedisiplinan sistem informasi perencanaan yang seharusnya dibangun secara terintegrasi di antara para walidata. Misal walidata sosial-ekonomi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), wali data perpetaan yaitu BIG, walidata kebencanaan yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan berbagai walidata lainnya.

Pada rangkaian ini, sangat penting untuk menempatkan posisi BPIW atau Kementerian PUPR secara umum, sebagai sumber data atau bahkan walidata untuk infrastruktur nasional, khususnya infrastruktur ke-PUPR-an. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang

disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data (Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia).

Seandainya ditunjuk sebagai walidata infrastruktur nasional, BPIW (mewakili Kementerian PUPR), siap untuk melakukan *sharing* data kepada instansi dan lembaga lainnya, termasuk kepada masyarakat. *Vice versa*, BPIW harus mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan data dan informasi dari Kementerian/ Lembaga lainnya. Implikasi dari hal ini adalah akan dibutuhkan pengembangan sistem informasi data infrastruktur nasional yang terintegrasi di internal Kementerian PUPR.

Dengan demikian model komunikasi data ini harus sudah mulai dibangun secara terintegrasi, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Meskipun disadari bahwa *standard platform* untuk data dan komunikasinya masih harus diperjuangkan antar K/L terkait. Berikut ini adalah contoh model walidata pada perencanaan pengurangan risiko kebencanaan.

Instansi K/L	Data
BIG	Peta dasar
BNBP	Peta indeks risiko bencana (*.shp, raster): 1) gempa bumi 2) tsunami 3) erupsi gunungapi 4) banjir 5) banjir bandang 6) tanah longsor 7) kekeringan 8) kebakaran hutan dan lahan 9) cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem
PVMBG	Peta KRB bencana (*.jpg) 1) Peta kawasan rawan bencana gunungapi 2) Peta geologi gunungapi 3) Peta zona kerentanan gerakan tanah 4) Peta kawasan rawan bencana gempa bumi 5) Peta kawasan rawan bencana tsunami
BMKG	Informasi kegunaan
LAPAN	Informasi peringatan dini dan tanggap darurat bencana berbasis data penginderaan jauh: informasi potensi banjir, informasi letusan gunung berapi
KLHK	1) Peta Lahan kritis berbasis DAS 2) Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Indikator (berbasis Jasa Ekosistem)

*Gambar 1. Contoh model Walidata Kebencanaan dalam proses perencanaan pengembangan wilayah dan kota (Sumber: Sugiyantoro, 2018)*

**(ii) Kunjungan lapangan via Google Street dan Google Map**

Disiplin perencanaan menghendaki cek lapangan, yaitu untuk merasakan situasi lapangan dan *ambience* atau suasana dari kawasan perencanaan. Observasi lapangan semacam ini dapat memotret banyak aspek dari sisi kehidupan manusia, karena “manusia/human” ini yang menjadi *subject* dari perencanaan.



Pembahasan perencanaan melalui video conference

Sumber: istimewa

Wujud ideal dari manusia/human sebagai *subject* perencanaan adalah dengan melihat sisi pentingnya posisi *human activities* dalam kegiatan perencanaan pengembangan wilayah. Dalam kegiatan perencanaan pengembangan wilayah, pemahaman mengenai ruang wilayah dan ketersediaan serta perencanaan infrastruktur wilayah menjadi sangat penting.

Ada tiga *layer* atau lapisan untuk perencanaan semacam ini, pertama adalah *layer* perencanaan fisik dasar (lihat Permen PU 20/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang). Betapa analisis fisik dasar ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam *Disaster Risk Reduction* (DRR) atau pengurangan risiko bencana (PRB) dan sekaligus menjadi alat mengukur KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Kebutuhan data pada *Layer* 1 dapat disediakan oleh para walidata kebencanaan, termasuk dalam hal ini adalah Kementerian PUPR untuk data banjir dan kekuatan lahan untuk pembangunan. Tentu dengan syarat ideal bahwa sistem informasi data telah mapan dan komunikasi data antarwalidata sudah terjalin dengan baik.

*Layer* kedua mengenai pemetaan dan pemahaam sistem infrastruktur jaringan pembentuk ruang wilayah. Pemahaman ini sekaligus untuk menjadi bahan perencanaan pengembangan infrasktruktur wilayah lebih lanjut, di mana hal ini

menjadi kompetensi BPIW. Kebutuhan data pada *Layer* 2 dapat disediakan apabila semua jenis infrastruktur *existing* telah dipetakan dan disepakati oleh para walidata terkait, missal Kementerian PUPR dengan BIG dan Kementerian ATR/BPN.

*Layer* ketiga adalah pemahaman mengenai *human activities* di dalam ruang wilayah. Ini adalah *subject* dalam perencanaan pengembangan wilayah, dan sekaligus *subject* di dalam perencanaan infrastruktur wilayah. Kebutuhan data pada *Layer* 3 dapat disediakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk melihat aktivitas dari atas secara virtual *but real-time*. Secara virtual tetapi tidak *real-time* dapat dilakukan sebagai sebuah pendekatan melalui *Google Street Views* untuk merasakan situasi lapangan.



Gambar 2. Layer dalam proses perencanaan ruang dan infrastruktur wilayah

(Sumber: Sugiyantoro, 2019)

*Kebutuhan berkomunikasi langsung di dalam kegiatan perencanaan adalah menjadi jantung dari kegiatan perencanaan. Paradigma terakhir dalam teori perencanaan adalah mengenai communicative planning, dimana perencana dan subject perencanaan dapat berkomunikasi dengan lancar.*

Dengan kebutuhan pemahaman di atas, maka kunjungan lapangan memang menjadi bagian yang sangat signifikan di dalam proses perencanaan. Saat ini media gratis untuk “berkunjung ke lapangan” secara virtual adalah melalui pemanfaatan teknologi Google *Street Views* dan Google Map. Hal ini sangat efisien untuk memahami situasi lapangan sebelum dilakukan keputusan untuk berkunjung ke lapangan. Sementara, melakukan perjalanan ke lapangan dengan *public transport* saat ini sangat berisiko terpapar virus COVID-19.

Sebenarnya Indonesia mempunyai lembaga yang dapat melakukan kunjungan lapangan secara virtual bahkan *real time*. Namun akses ini belum tentu bisa dibuka untuk semua lembaga yang terkait dengan perencanaan. Lembaga ini adalah LAPAN yang mempunyai kapasitas untuk menyediakan *real time* informasi via satelit, sehingga perencana dapat melihat situasi lapangan dari “atas”.

Seandainya akses semacam ini dapat “dihibahkan” kepada beberapa K/L via *authorisasi* LAPAN, maka kegiatan perencanaan di level wilayah seluas Indonesia ini sungguh sangat efisien. “Dihibahkan” di sini artinya K/L terkait mempunyai satu set peralatan di lingkungan K/L masing-masing untuk melakukan kegiatan sebatas *authorisasi* dari LAPAN. Memang hal ini akan sangat mahal. Pilihan paling murah adalah berkunjung ke LAPAN di Jakarta Timur untuk ikutan “berkunjung *real-time but virtual*”.

### **(iii) Pemanfaatan aplikasi online**

Hal terakhir adalah mengenai pemanfaatan aplikasi online untuk melaksanakan tiga komponen dalam proses perencanaan, yaitu wawancara, diskusi, seminar, FGD, dan penyebaran kuesioner. Saat ini aplikasi online untuk melayani kegiatan *real-time video conference* banyak tersedia di pasaran, baik gratis maupun berbayar, antara lain yang terkenal adalah ZOOM dan SKYPE. Kedua aplikasi ini bahkan dilakukan untuk pelaksanaan perkuliahan secara *online* di perguruan tinggi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebutuhan berkomunikasi langsung di dalam kegiatan perencanaan adalah menjadi jantung dari kegiatan perencanaan. Paradigma terakhir dalam teori perencanaan adalah mengenai *communicative planning*, di mana perencana dan *subject* perencanaan dapat berkomunikasi dengan lancar, sementara perencana hanya berposisi sebagai mediator ataupun fasilitator. *Communicative planning* ini pula yang mendorong terciptanya *collaborative planning* di mana seluruh *stakeholders* mempunyai akses yang baik untuk berkontribusi dalam perencanaan pengembangan wilayah.

Dengan demikian, pemanfaatan aplikasi *online* semacam *video conference*, Google *Forms* dan Microsoft *Forms* untuk kuesioner dengan demikian menjadi instrument yang sangat strategis di masa pandemi Covid-19.



# Pengenalan Perencanaan Skenario di Tengah Ketidakpastian

**Dr.Eng. Mangapul L. Nababan, S.T., M.Si.**

*Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan  
Sekretariat BPIW Kementerian PUPR*

Kejadian Pandemi Covid - 19 membawa implikasi tidak saja dalam sektor kesehatan, namun lebih jauh berdampak terhadap berbagai peri kehidupan secara global. Infrastruktur yang selama ini direncanakan dan diprogramkan belum mempertimbangkan faktor bencana global sekelas Covid-19.

Dalam prosesnya, Perencanaan dan pemrograman Pembangunan infrastruktur secara konvensional sangat tergantung kepada proyeksi-proyeksi makro ekonomi baik di tingkat global, nasional bahkan local. Hal ini dapat dipahami karena sifat infrastruktur sebagai sektor pendukung yang lazim disebut sebagai *social overhead capital*. Kemudian, *social overhead capital* ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *economic overhead capital* yang sifatnya benar-benar

mendorong faktor produksi sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, kelautan dan lain-lain. Di BPIW beberapa sektor tersebut kita dukung dalam bentuk perencanaan dan pemrograman infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah yang memiliki kawasan-kawasan prioritas dengan aktivitas ekonomi dan potensi ekonomi seperti di atas. Bentuknya dapat berupa infrastruktur jalan, jaringan energi, air baku untuk irigasi, telekomunikasi, jaringan rel, bandara, pelabuhan dan lain-lain.

Kategori lain adalah *social capital* seperti investasi infrastruktur pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Selanjutnya kita juga memahami jika investasi infrastruktur bersifat jangka panjang dan *jarang bersifat quick yield*. Hal ini juga terkait dengan sifat investasi infrastruktur yang

bersifat `lumpy` yakni membutuhkan investasi besar dalam satu waktu, karena jika dilaksanakan dalam porsi kecil, atau istilahnya diecer-ecer, manfaatnya tidak akan kelihatan secara substansial.

BPIW sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur bekerja dengan mengacu berbagai rencana-rencana baik yang disusun secara nasional lintas K/L dan lintas daerah, diinisiasi oleh BPIW sendiri dan bahkan yang secara direktif diturunkan dari kebijakan lebih tinggi. Tidak jarang proses perencanaan dan pemrograman memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang dimungkinkan akibat semakin dinamisnya lingkungan strategi, atau bahkan perlunya penyesuaian terhadap berbagai asumsi dasar yang menjadi acuan awal suatu rencana.

### **Infrastruktur di Era Pandemi**

Sejak pengumuman pertama kasus Covid - 19 di Indonesia, telah banyak hal yang dilakukan sebagai respon baik oleh pemerintah maupun berbagai pihak dalam menghadapi pandemic skala global tersebut. Untuk kondisi tersebut, perencanaan dan pengambilan kebijakan dituntut dapat melakukan mitigasi terhadap dampak pandemic terhadap berbagai aspek kehidupan dan masyarakat yang tak jarang dilakukan dalam kondisi perubahan yang cepat, penuh ketidak pastian (*uncertainty condition*) dan keterbatasan pengalaman dalam pengambilan kebijakan.

Yang paling terbaru terkait perencanaan pembangunan ke depan adalah upaya pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang diyakini dapat segera mempercepat pemulihan ekonomi untuk kegiatan ekonomi yang diprediksi dapat segera pulih di diantaranya untuk mendukung lima lokasi destinasi pariwisata super prioritas, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ketahanan dan produksi pangan, (antara lain *food estate* di Kalimantan Tengah), prasarana menunjang kawasan industri, dan pembangunan *Information and Communication Technology* (ICT) hingga perdesaan (*last mile*).

Dalam nota keuangan pemerintah yang disampaikan

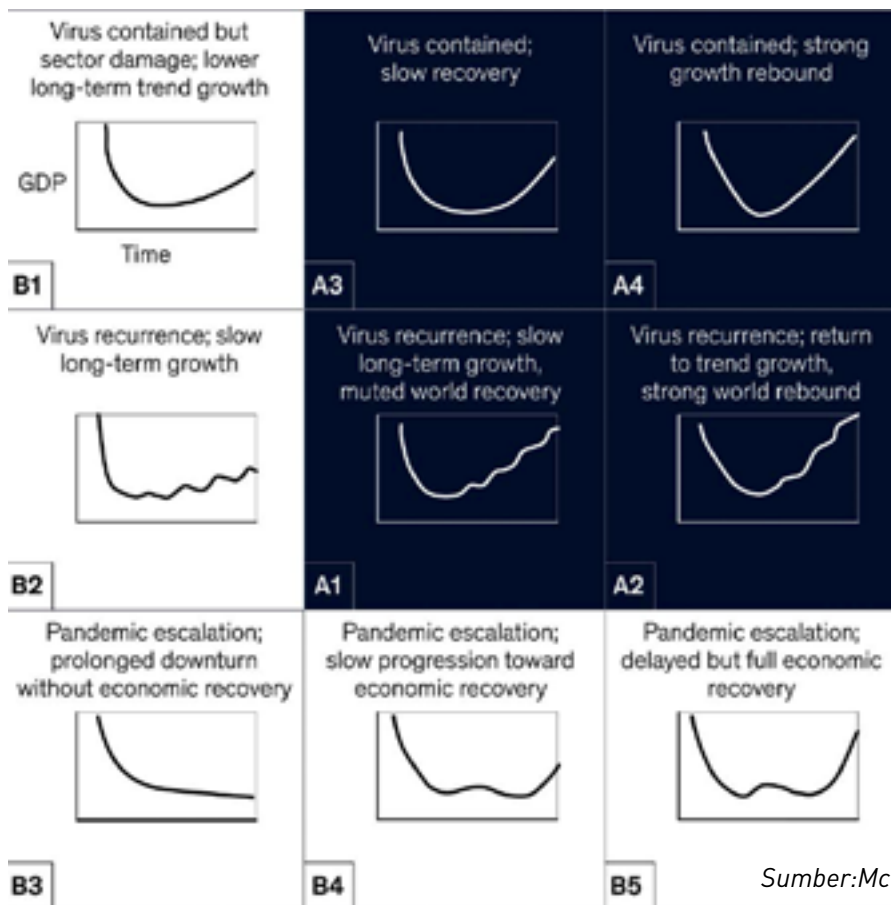
didepan parlemen pada pertengahan Agustus 2020, kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021 dialokasikan sebesar Rp 356,5 triliun,

Presiden Jokowi menyebut program PEN tahun depan akan diarahkan untuk:

- Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.
- Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.
- Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.
- Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.
- Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.
- Keenam, insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana perencanaan dan pemrograman infrastruktur di era Pandemi seperti saat ini? Secara hirarki kebijakan tentu BPIW akan mengacu kepada kebijakan nasional yang mengatur hal-hal strategis di atas. Kementerian PUPR juga bersinergi dengan K/L lain mendorong pembangunan infrastuktur dengan program padat karya.

Dalam jangka pendek tentu hal ini menjadi pilihan yang paling realistis untuk mempercepat `economic rebound` yang diharapkan dapat membawa kita lepas dari ancaman resesi. Namun untuk jangka panjang, perlu dikembangkan suatu pemikiran bagaimana



Sumber: McKinsey & Company, 2020

proses perencanaan dan pemrograman mengantisipasi ketidakpastian seperti kondisi bencana/*pandemic* Covid - 19 saat ini. Karena bukan tidak mungkin bencana atau ketidakpastian seperti ini dapat terjadi dalam bentuk berbeda yang berdampak global dan pastinya berimplikasi terhadap target-target awal perencanaan infrastruktur.

Di bawah ini akan dibahas suatu pendekatan yang memungkinkan diadopsi untuk perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur.

### Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Infrastruktur

Perencanaan skenario memungkinkan Perencana memproyeksikan dan menganalisis beberapa versi skenario atau kondisi di masa depan. Tidak seperti perencanaan dengan pendekatan tradisional yang cenderung memprediksia satu kondisi atau *outcome* dari rencana. Selain itu, perencanaan skenario

mendorong pengguna/planners untuk memperkirakan ketidak pastian dan membayangkan/mengidentifikasi beberapa tujuan akhir. Kelebihan lainnya adalah secara teknis, rencana yang dihasilkan akan mampu merespon perubahan-perubahan yang cepat sehingga suatu organisasi dapat mengelola dan memitigasi ketidakpastian. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Pandemi Covid - 19.

Kita bisa bayangkan bagaimana perubahan asumsi kebutuhan infrastruktur harus segera dikalkulasi ulang untuk mengantisipasi kondisi dimana anggaran dana publik yang tidak optimal dan efisien, karena menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sangat tidak tepat karena terkena dampak Covid - 19. Di bawah ini adalah Gambar contoh beberapa skenario yang memproyeksikan beberapa kemungkinan pemulihan ekonomi pasca covid.

Dengan terjadinya perubahan yang sangat cepat, tentu respon perencanaan dan pemrograman juga



harus menyesuaikan dari sisi waktu. Jika perencanaan tradisional seringkali menggunakan asumsi suatu kondisi yang hamper statis selama 20 atau bahkan 50 tahun ke depan, maka belajar dari kejadian Covid - 19 yang memiliki variasi kondisi hingga hitungan hari per hari, maka Perencana mungkin harus merasionalkan substansi rencananya dalam kurun waktu 12 to 18 bulan ke depan.

Beberapa perubahan yang secara kasat mata dapat kita lihat dan memiliki implikasi terhadap Perencanaan kota misalnya:

- Dampak anjuran tetap bekerja, belajar, beribadah di rumah yang berdampak besar terhadap penggunaan lahan, kebutuhan ruang dan perumahan.
- Pertumbuhan sktor ritel yang menciptakan peluang lokal, termasuk ritel *online* dan bisnis *food delivery* yang pertumbuhannya semakin kuat.
- Kebutuhan akan transportasi publik yang aman, ruang untuk pedestrian dan infrastruktur buat pejalan kaki dan pengendara sepeda yang mungkin akan mengubah struktur kota.
- Hal lain adalah semakin tumbuhnya kesadaran lokal akan pentingnya fasilitas penting yang selama ini diabaikan terkait dengan penyediaan air minum, sanitasi, kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit dan lain-lain.

## Penutup

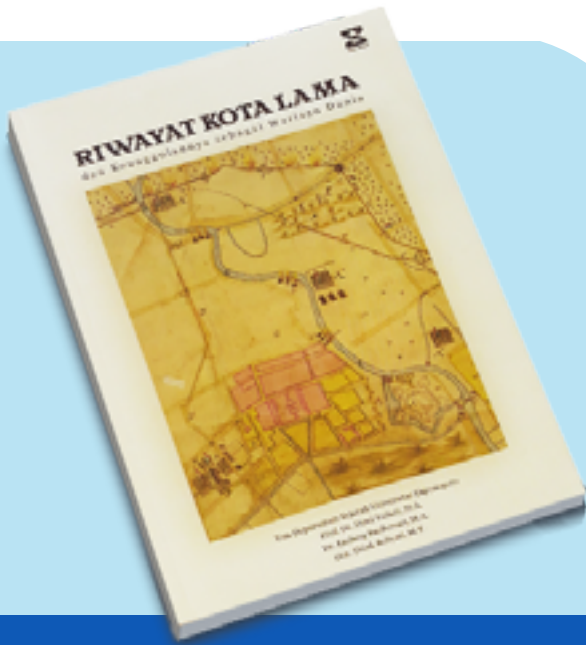
Perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur perlu segera mengadopsi prinsip-prinsip *uncertainty* yang tentu akan berdampak kepada pemilihan dan varian scenario yang dituangkan dalam bentuk simulasi kondisi dan target di masa depan. Kejadian Covid - 19 membuka mata dunia bahwa perlu terobosan untuk lebih reaktif dan responsif terhadap berbagai perubahan yang mempengaruhi perencanaan dan pemrograman. Untuk lingkup BPIW, perlu pengembangan perangkat, metode, teknik analisis yang mampu menjawab berbagai kebutuhan untuk penerapan perencanaan scenario. Hal ini penting untuk memastikan infrastruktur dan kawasan yang kita rencanakan dan programkan benar-benar optimal dan

efektif fungsinya serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

## Referensi

1. <https://www.forbes.com/sites/tiffanychu/2020/05/11/transportation-agile-experimentation/#4511b28b5a22>
2. Emma Zehner, How to Embrace and Navigate Uncertainty, <https://www.lincolnst.edu/publications/articles/2020-06-scenario-planning-pandemic-navigating-managing-uncertainty>
3. Futrell, Janae. 2019. "How to Design Your Scenario Planning Process." *PAS Memo*. July/August: 1–20. <https://www.planning.org/publications/document/9180327/>.
4. Goodspeed, Robert, *Scenario Planning for Cities and Regions, Managing and Envisioning Uncertain Futures*, Lincoln Institute of Land Policy

# Menggali Sejarah di Balik *The Living Heritage*



Judul Buku :

**Riwayat Kota Lama dan Keunggulannya  
sebagai Warisan Dunia**

Penulis :

**Tim Departemen Sejarah Universitas Diponegoro (Prof. Dr. Dewi Yulianti, M.A; Dr. Endang Susilowari, M.A; dan Dra. Titiek Suliayati, M.T)**

Penerbit :

**Sinar Hidoep**

Tahun Terbit : 2020

ISBN

**9786026196644**

Terbentuknya kota Semarang, dirintis oleh Ki Ageng Pandan Arang (Putera Panegeran Sabrang Lor), Sultan Demak II. Pada tahun 1476 Pandan Arang melaksanakan perintah Sunan Bonang untuk berdakwah di Pulo Tirang, di mana di sana terdapat banyak kalangan *ajar* yakni guru atau pendeta agama Hindu-Budha. Pulo Tirang ini yang kemudian menjadi cikal bakal Kota Semarang. Di sana tumbuh pohon Asam (Asem) yang masih jarang (*arang*), dan diperkirakan dari situlah asal muasal nama Semarang (*Asem Arang*).

Semarang kemudian menjadi wilayah administratif yang dipimpin oleh putera Pandan Arang, yaitu Ki Ageng Pandan Arang II. Seiring berjalannya waktu, Semarang terus berganti patron hingga akhirnya jatuh ke tangan VOC ketika Semarang berada di bawah patron kerajaan Mataram yang dipimpin

oleh Amangkurat II. VOC memilih Semarang dari daerah lain yang dikuasai Mataram, setidaknya karena beberapa alasan:

- Lokasinya strategis (Merupakan pintu masuk paling strategis menuju Mataram dari pesisir utara Jawa)
- Kekayaan alam dan potensi ekonominya luar biasa
- Karakter pemerintah dan masyarakatnya terbuka

Hingga akhirnya Semarang pun mampu menggantikan posisi Jepara sebagai pusat kantor VOC. Bahkan Semarang pernah menjadi Ibu kota Provinsi Pantai Utara-Timur Jawa pada tahun 1746, yang membentang dari Sungai Losari Cirebon, hingga Surabaya.

Sebagai salah satu kota penting di Jawa, Semarang memiliki berbagai sarana yang relatif lengkap, mulai dari jalan, transportasi, pasar, dan bank yang tumbuh bersama berkembangnya Kota Lama. Semarang dilintasi oleh Jalan Raya Pos/ *de Grootte Postweg* yang terkenal dari mulai Anyer sampai Panarukan, dibangun oleh Herman Willem Daendels pada tahun 1808-1811. Di kota Semarang, jalan ini melintas di jalan Bojong (jalan Pemuda), *Heerenstraat* (Jalan Letjen Suprpto), Karangbidara (Jalan Raden Patah), hingga terus ke arah Demak.

## **Benteng-benteng Belanda di Semarang**

Mulai tahun 1678 VOC berusaha untuk menguasai pantai Utara-Timur Jawa dengan membangun *loji* di daerah pantai, kemudian dengan leluasa memonopoli perdagangan di sana. Akhirnya VOC pun mulai membangun benteng-benteng yang mereka namai *Comps Pagger* atau Benteng Pagger Kompeni. Tidak hanya di Semarang, VOC membangun benteng-bentengnya di Tegal, Rembang, Surabaya (yang terluas), dan Mataram Kartasura. Pada setiap benteng ini VOC melengkapi dengan balok-balok runcing yang disusun rapat (*palissade*) dan puluhan meriam untuk sistem pertahanannya. Di buku ini dilampirkan gambar-gambar sketsa asli setiap benteng.

Selain Benteng Pagger, Kompeni juga membuat benteng berbentuk segi lima bernama *De Vijfhoek*. Di dalam buku ini dijelaskan detail bagaimana bentuk benteng, bagian bangunan, fungsinya, serta sketsanya. Benteng ini mengalami banyak kerusakan akibat adanya Perang Semarang yang berlangsung selama 5 bulan antara orang-orang Tionghoa melawan VOC. Perang ini terjadi akibat pembantaian yang dilakukan VOC terhadap orang Tionghoa di Batavia, karena VOC merasa terusik dengan banyaknya imigran gelap Tionghoa.

Akibat kerusakan-kerusakan itu, Belanda mengganti Benteng *Vijfhoek* dengan pertahanan baru berupa parit dan tembok keliling yang lebih besar, lengkap dengan pos-pos penjagaannya. Tembok dan parit itu mengelilingi seluruh kawasan permukiman Eropa atau *Europeesche Buurt*. Dengan

demikian sejak saat itu Semarang menjadi Kota Benteng yang melindungi orang-orang Eropa.

### **Kota Lama sebagai Pusat Industri dan Perdagangan**

Pada abad ke 20, kawasan Kota Lama Semarang (*Europeesche Buurt*) cenderung berkembang ke arah komersial. Hal itu ditandai dengan banyaknya kantor-kantor perusahaan, perbankan, pabrik, dan pertokoan. Salah satu bisnis yang paling mengemuka pada saat itu adalah bisnis gula. Perdagangan gula makin meningkat seiring dengan pemberlakuan *Agrarischewet* (UU Agraria) dan *Suikerwet* (UU Gula) pada tahun 1870. Hal ini telah menjadikan gula suatu komoditas primadona dan salah satu komoditas ekspor yang sangat menjanjikan.

Kota Lama Semarang juga menjadi pusat industri manufaktur yang memproduksi barang setengah jadi dan barang konsumsi. Industri percetakan dan penerbitan juga berpusat di Semarang dan telah memicu penerbitan buku dan surat kabar. Banyak surat kabar terkemuka muncul dari maraknya industri percetakan ini. Setidaknya saat itu ada 31 surat kabar yang berkantor redaksi di Semarang.

Industri jasa seperti telekomunikasi (Pos, Telegraf, dan Telepon), perbankan dan asuransi, perusahaan makelar, perusahaan transportasi, hotel dan tempat hiburan, hingga jasa pengacara dan notaris juga tersedia di Semarang. Namun nasib Kota Lama Semarang sebagai pusat bisnis kian memburuk pasca Peran Dunia II.

Selain menjadi pusat berbagai Industri, Semarang juga menjadi pusat aktivitas ekspor-impor yang berada pada puncak kejayaannya pada paruh kedua abad ke-19 hingga perempat pertama abad ke-20. Dengan peran ini, Semarang telah menjadi kota tersibuk di Hindia Timur. Bahkan H.J.F.M. Sneevliet menyebut Kota Keresidenan Semarang sebagai "Tanah Berkah" yang sangat berharga bagi VOC.

Pada awal abad ke-19, performa perusahaan-perusahaan dagang Inggris jauh lebih baik daripada perusahaan dagang Belanda. Mereka mampu memanfaatkan momentum berkuasanya negara mereka di Hindia. Perusahaan besar tumbuh dengan baik seperti *Deans Scott&Co* yang bergerak di tekstil, *John MacMaster* bergerak di Kopi, *McNeill&Co* yang menguasai tebu. Selain itu, perusahaan Perancis *Tissot&Co* berhasil berkembang pesat mengambil alih pabrik gula.

Belanda yang merasa tidak tenang dengan perkembangan perusahaan-perusahaan Eropa itu, kemudian membentuk *Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM)* dan *De Javasche Bank*. NHM sebagai agen perusahaan dagang kolonial menjalankan aktivitas pengangkutan dan penjualan produk-produk ekspor ke Negeri Belanda dari hasil penen sistem tanam paksa. Sementara *De Javasche Bank* menjalankan fungsi sebagai Bank Sirkulasi Pemerintah dan mengatur system pembayaran di Hindia Belanda. Keduanya sukses dan mampu menekuk pesatnya laju perusahaan-perusahaan Inggris.

### **Riwayat Bangunan di Kota Lama**

Nilai unggul Kota Lama Semarang adalah keotentikannya. Meski telah berusia lebih dari 2,5 abad, struktur kawasan ini relatif tidak berubah, termasuk sebagian besar bangunan

yang ada di dalamnya. Setiap bangunan memiliki cerita dan riwayat yang membuka jendela sejarah masa lalu akan peran penting Kota Lama di masa silam. Bab ini adalah bagian paling banyak dari isi buku ini dan dijelaskan secara rinci riwayat bangunan-bangunan sesuai dengan ruas jalan lokasi bangunannya.

Ada 16 ruas jalan dengan puluhan bangunan di dalamnya yang dibahas dalam bab ini. Yang pertama adalah Jalan Letjen Suprpto-Purwodinatan-*Heerenstrat*. Pada ruas ini dibahas riwayat bangunan-bangunan yang terletak di jalan Letjen Suprpto no. 1 sampai 63 (*Heerenstrat* no. 1-63). Selain riwayat masa lampau, juga setiap bangunan ada keterangan saat ini (2020) difungsikan sebagai apa. Salah satu bangunan penting di sini adalah gedung eks *De Javasche Bank* yang kini digunakan oleh Semarang Kreatif Galeri, Keris Café, dan penginapan Bobobox. Selain itu di ruas ini juga berdiri bangunan Gereja Protestan Immanuel yang kini menjadi ikon Kota Lama Semarang.

Ruas kedua adalah Jalan Taman Srigunting-Taman Purwodinatan-*Paradeplain*. Taman Srigunting saat ini, pada tahun 1805 adalah gedung Balaikota hasil pembangunan kembali karena telah terbakar sebelumnya. Namun pada 1850 gedung ini kembali terbakar, 12 tahun kemudian gedung ini dibongkar dan hanya disisakan satu bagian yaitu rumah sipir (*ciplierswoning*). Sekarang daerah ini telah menjadi taman Srigunting. Dalam bagian ini dibahas semua bangunan sampai jalan Taman Srigunting 14 (*Paradeplain* 14). Dibahas juga situs sumur *artesis* yang dibangun tahun 1841 dan saat itu mampu menyediakan 50.000 ember air dalam sehari guna menanggulangi wabah malaria dan kolera yang kerap melanda Kota Lama Semarang. Selanjutnya adalah pembahasan gedung-gedung di 14 ruas jalan lainnya di sekitar Kawasan Kota Lama.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Kota Lama Semarang (*de Oude Stad*) adalah sebuah *living heritage* yang mewariskan nilai historis penting, di antaranya: fungsi sebagai aktivitas politik, ekonomi, budaya dan sosial. Selain itu, kota ini memperlihatkan tata ruang kota yang khas dimana ruang peribadatan (gereja) berada di pusat kota, pusat pemerintahan berdekatan dengan ruang peribadatan, ruang publik, entertainment, dan ruang aktivitas bisnis. Bangunan dan situs cagar budaya di Kawasan Kota Lama masih dapat dibuktikan nilai keasliannya dan masih memperlihatkan batas-batas kawasan yang jelas. Kota ini dapat disebut *living heritage* karena bangunan dan ruangnya masih hidup dan digunakan untuk berbagai aktivitas seperti perkantoran, galeri seni, restoran, dan ruang publik. Oleh karena itu, semua warisan budaya tersebut perlu segera dilindungi dan dikembangkan.

Pendanaan untuk pengelolaan cagar budaya ini perlu dirancang di dalam APBD dalam skema jangka pendek, menengah, dan panjang. Rancangan perlindungan cagar budaya ini juga telah memiliki payung hukum, yaitu pasal 12 Perda Provinsi Jawa Tengah no. 10 tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

(Disarikan oleh: **Mutri Batul Aini**)



# Pembangunan Infrastruktur PUPR pada Masa Pandemi Covid-19

*Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah rutin membuat guntingan berita harian terkait pembangunan infrastruktur PUPR. Rubrik ini khusus membahas berita-berita pembangunan infrastruktur PUPR yang dominan muncul diberitakan di media cetak dan elektronik dalam kurun waktu 2 bulan terakhir.*

**K**ondisi Pandemi virus Covid-19 telah berlangsung kurang lebih tujuh bulan terhitung sejak muncul pertama kali di Wuhan-China pada Desember 2019 lalu. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda penurunan kurva angka penularan Covid-19 terutama di Indonesia. Warga telah dipaksa untuk berdiam diri di rumah selama kurang lebih tiga bulan (Maret-Mei 2020), dan saat ini aktivitas warga sudah harus mulai bergeliat kembali meski belum sepenuhnya pulih. Pemerintah mau tidak mau menerapkan fase peralihan yang disebut new normal karena kondisi ekonomi akan makin melemah jika aktivitas masyarakat terus dibatasi. Namun demikian, sektor yang sangat rawan seperti pendidikan masih ditutup di zona-zona merah, terutama di kota-kota besar.

Pada Rubrik Sorot Edisi 45 yang lalu, kami telah merangkum beberapa kebijakan pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di masa pandemi. Kementerian PUPR telah melakukan *refocusing* anggaran hingga Rp. 44,58 triliun yang sedianya untuk pembangunan infrastruktur lalu diarahkan untuk penanganan Covid-19. PUPR juga mengeluarkan kebijakan terkait jasa konstruksi selama masa pandemi, dan membangun beberapa rumah sakit khusus untuk penanganan pasien Covid-19.

#### **Upaya Kementerian PUPR dalam Penanganan Pandemi**

Hingga saat ini Kementerian PUPR juga terus mendukung upaya

pemerintah dalam penanganan Covid-19. Pada periode Mei-Juni ini upaya difokuskan untuk lebih mendongkrak kembali aktivitas ekonomi yang menurun. Upaya pertama yang dilakukan Kementerian PUPR adalah dengan memberikan kontribusi langsung berupa bantuan sosial (bansos) sejumlah 56.125 kantong sembako senilai Rp. 10 miliar secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Penyaluran bantuan ini adalah sebagai bukti kepedulian Kementerian PUPR bersama Dharma Wanita, KORPRI Kementerian PUPR, OASE Kabinet Indonesia Maju dan mitra kerja guna mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Covid-19 (Media Indonesia, 4 Mei 2020). Bantuan-



bantuan sosial sejenis ini juga sering dilakukan Kementerian PUPR secara berkala.

Upaya kedua adalah dengan menggunakan bahan karet alam untuk campuran aspal pada pembangunan jalan nasional. Penambahan karet alam sebagai campuran aspal mampu meningkatkan kualitas pengerasan permukaan dan ketahanan alur badan jalan.

Selain itu, penggunaannya juga membantu penyerapan karet rakyat. PUPR menyiapkan anggaran Rp.100 miliar untuk membeli 10.000 ton karet langsung dari petani di sejumlah wilayah produsen karet. “Pembelian aspal karet tersebut sebagai salah satu mitigasi dampak Covid-19 yang

menyebabkan produksi karet sulit diserap oleh pasar karena aktivitas ekonomi yang terhenti,” jelas Menteri Basuki Hadimuljono yang dimuat medcom.id pada 7 mei 2020 lalu.

Upaya ketiga, sebagaimana diberitakan pada laman investor.id pada 12 Mei lalu, adalah dengan menggelontorkan anggaran senilai Rp11,26 triliun untuk Program Padat Karya Tunai (PKT atau *Cash for Work*) agar dapat menyerap tenaga kerja masyarakat.

Skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang sebelumnya bersifat reguler dengan cara menggunakan sejumlah alat berat, kini pelaksanaannya diubah dengan pola Padat Karya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan pola kegiatan reguler menjadi padat karya diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran akibat Covid-19 dengan menambah tenaga kerja dan mengurangi penggunaan alat berat. Dirjen Cipta Karya, Danis Sumadilaga mengungkapkan bahwa program PKT terdiri dari berbagai kegiatan seperti di bidang sumber daya air, bidang jalan, bidang perumahan dan permukiman yang dilaksanakan di 23.230 lokasi yang tersebar merata di 34 provinsi (kontan, 14 Juni 2020)

Di bidang jalan, misalnya, program PKT dilakukan dengan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaran Rp 518,44 miliar yang ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 12.197 orang dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 496,08 km dengan anggaran Rp 110,56 miliar yang ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.960 orang (timesindonesia.co.id, 5 Mei 2020).

Dari sektor lain, Kementerian

PUPR melaksanakan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di 364 kelurahan seluruh Indonesia dengan anggaran Rp382 miliar. Kotaku adalah program perbaikan kualitas kawasan pemukiman kumuh di perkotaan (CNN Indonesia, 5 Mei 2020).

Inovasi teknologi Kereta MCK dan wastafel juga diluncurkan untuk meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat kepada masyarakat di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak (timesindonesia.co.id, 5 mei 2020).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga digulirkan Kementerian PUPR guna mengurangi pengangguran. Di Kalimantan Tengah terdapat 1500 penerima program BSPS, sementara di Bengkulu 2000 penerima BSPS, serta di tempat-tempat lainnya (antaranews 17 Mei 2020).

### Peran BPIW di Masa Pandemi

Dari sisi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Pandemi juga telah membawa pengaruh dalam proses perencanaan dan pemrograman. Bencana non-alam seperti covid-19 ke depannya akan menjadi indikator penyusunan program pembangunan Infrastruktur PUPR.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun PUPR menyesuaikan kondisi pandemi. Beberapa penyesuaian itu antara lain, pertama, mengubah skema proyek tahun tunggal (*single year*) menjadi tahun jamak (*multi years*) untuk mendukung program padat karya.

Kedua, penyesuaian pada pembangunan fisik infrastruktur. Misalnya standar rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diperluas lagi dengan menambahkan fasilitas internet agar masyarakat lebih nyaman bekerja dari rumah.



Kegiatan padat karya di Sorong Papua Barat

Sumber: BPIW

Ketiga, Transformasi kota masa depan harus memperhatikan ketahanan kota terhadap bencana untuk mengantisipasi kemungkinan resiko bencana non-alam di masa depan. Kota masa depan juga mengakomodir *smart city* yang *inklusif* berbasis teknologi untuk mengakomodir tata kelola kota yang lebih efisien (Instagram @informasibpiw Rabu 20 Mei 2020).

Selain itu, saat ini BPIW atas arahan Menteri PUPR juga tengah menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Metropolitan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. Hal itu dilakukan karena wilayah paling terdampak oleh Covid-19 adalah kawasan-kawasan perkotaan. Diharapkan dengan perencanaan ini, maka aktivitas ekonomi, industri, dan sosial budaya dapat kembali bergeliat dan berdaya setelah menurun akibat pandemi.

### (Mutri Batul Aini)

# "New Normal" di kantor

Yuk, cek tipsnya

Pelaksanaan *new normal* sudah berlaku sejak sebulan lalu. Sebagian perkantoran sudah menganjurkan karyawannya untuk masuk kerja dengan sistem sebagian WFO (*work from office*) dan WFH (*work from home*). Banyak hal yang perlu kita perhatikan saat keluar dari rumah, terutama untuk pergi bekerja. Upaya agar terhindar dari penyebaran virus corona harus tetap kita jaga. Untuk membantu dalam pencegahan penularan covid-19, tim bulletin punya tips nya nih, yuk sambil dipersiapkan apa yang harus selalu kita bawa dalam tas. Berikut penjelasannya.



## Alat-alat yang perlu ada di dalam tas :



## Perlu juga diperhatikan :

- Selalu menggunakan masker
- Rajin mencuci tangan
- Tetap menjaga jarak setidaknya 2 meter
- Tidak bersalaman cukup dengan "namaste"
- Menggunakan pembayaran non tunai





## SURAT PEMBACA

### Surat Pembaca\_1



#### Dukungan Infrastruktur untuk Pengembangan Pariwisata Perlu Pendekatan *Bottom Up* dan *Inclusive*

Salah satu kekayaan Indonesia yang belum dikembangkan secara maksimal adalah potensi di sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berkembang pesat di seluruh dunia dalam kurun 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata merupakan langkah baik bagi Indonesia dalam memacu perkembangan ekonomi lokal maupun regional. Pariwisata tentu tidak hanya dapat dikembangkan oleh pihak swasta maupun masyarakat lokal, tapi juga perlu dukungan dari pemerintah.

Untuk itulah peran BPIW Kementerian PUPR yang menangani dukungan infrastruktur bagi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi penting. Pengembangan KSPN dengan pendekatan top down approach, ditakutkan akan memunculkan eksklusifitas bagi masyarakat lokal. Alangkah baiknya jika dukungan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata juga dikembangkan dengan pendekatan bottom up dan inclusive, dimana masyarakat lokal turut dilibatkan, turut didengar masukannya, dan juga diberdayakan. Dengan begitu, pengembangan pariwisata di Indonesia, kedepannya mampu memberikan dampak seluas-luasnya, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal.

**Alifan Cahyana**  
Belanda

### Surat Pembaca\_2



#### Perlu Inovasi Terkait *Green Infrastructure*

Selama ini pamor kementerian PUPR kian meningkat dengan semakin banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang dibangun selama masa periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan ribuan kilometer, jalan tol dan puluhan bendungan menghiasi sebagian besar media selama kurang lebih lima tahun terakhir. Kondisi tersebut, jangan membuat kementerian PUPR merasa di atas angin, sebab pembangunan tidaklah boleh berhenti pada tahap penyediaan produk atau output saja, melainkan juga harus menjamin outcome dan keberlanjutannya.

Perawatan, monitoring, serta evaluasi perlu terus dilakukan guna menjamin primanya performa infrastruktur. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dalam konteks keberlanjutan pembangunan, Kementerian PUPR kedepan, perlu berinovasi dalam hal green infrastructure yang menjamin pelaksanaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Selain menekan berbagai biaya, green infrastructure juga sebagai upaya menjaga kondisi bumi dan menanggulangi perubahan cuaca yang makin massif. Oleh karenanya, Kementerian PUPR janganlah berhenti untuk berinovasi dan menjamin keberlanjutan infrastruktur Indonesia. Majulah Kementerian PUPR!.

**Syifa**  
Yogyakarta



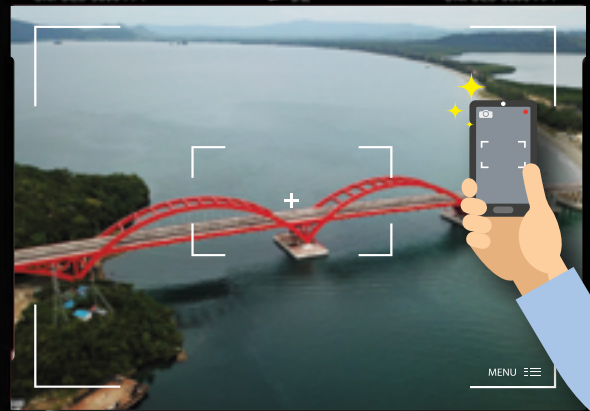
# BIDIK LENSA

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu dalam pengembangan suatu kawasan dan wilayah di Tanah Air. Program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman. Pada edisi ini rubrik bidik lensa Buletin Sinergi memotret pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di wilayah Timur Indonesia.

## JEMBATAN YOUTEFA

*Jayapura, Papua*

Jembatan Youtefa yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi Papua kini sudah beroperasi. Jembatan ini menjadi sarana konektivitas dan jalur logistik masyarakat Jayapura. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Papua.



## VENUE OLAHRAGA

*Jayapura, Papua*

Guna mendukung kesiapan sarana prasarana event Olahraga Pekan Nasional (PON) ke-XX yang akan diselenggarakan di Papua pada Oktober 2020, Kementerian PUPR terus berupaya menyelesaikan berbagai pembangunan venue olahraga yang menjadi kebutuhan PON. Keberadaan venue olahraga dan pelaksanaan PON ini diharapkan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi cepat di Papua.





## PLBN SKOUW

 Jayapura, Papua

PLBN Skouw yang dibangun Kementerian PUPR di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua kini menjadi kawasan yang mampu menarik banyak pengunjung. Kedepan Kementerian PUPR melalui BPIW menyusun program pengembangan wilayah sekitar PLBN Skouw yang diharapkan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia.



## PLBN MOTAAIN

 Jayapura, Papua

Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedepan Kementerian PUPR melalui BPIW akan menyiapkan program untuk pengembangan wilayah di sekitar PLBN Motaain. Diharapkan manfaat pembangunan di sana berdampak pada tumbuhnya ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan tersebut.



## BPIW Kaji Serang Raya

BPIW Kementerian PUPR telah melakukan kajian terkait usulan Serang Raya yang terdiri dari Kota Serang,

Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Menurut Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, hasil kajian menunjukkan bahwa Serang Raya memenuhi kriteria sesuai PP 15/2010 untuk layak menjadi Metropolitan.

“Kita memberikan masukan atau rekomendasi terkait usulan Gubernur Banten yang disampaikan ke Presiden yang diteruskan ke menteri-menteri termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Ternyata setelah kita cek enam kriteria, semuanya lulus, artinya layak untuk dijadikan Metropolitan Serang Raya” ujar Hadi, Jumat, 8 Mei 2020. (hen/infoBPIW)

Mei



Guna persiapan menjelang era *new normal* dan menanggulangi penularan Covid-19 di lingkungan kantor Kementerian PUPR, jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan kerja bakti, penataan, kebersihan ruangan dan lingkungan kerja, Jumat (29/5).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan serentak yang dilakukan jajaran BPIW ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR No. UM 0203-sj/416 tentang Kerja Bakti di Ruang Kerja Unit Organisasi Kementerian. Guna persiapan menjelang era *new normal* dan menanggulangi penularan Covid-19 di lingkungan kantor Kementerian PUPR, jajaran BPIW melakukan kerja bakti, penataan, kebersihan ruangan dan lingkungan kerja, Jumat (29/5). Ia berharap, saat berkerja dalam *new normal* nanti jajaran BPIW dapat selalu mentaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak fisik sosial, serta rajin cuci tangan. (ris/infoBPIW)



### Pegawai BPIW Kerja Bakti di Lingkungan Kerja

**Juni**

## **BPIW Bangun Kekompakan Pimpinan dan Pegawai**

Lima pejabat pimpinan tinggi pratama di BPIW yang dilantik Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melakukan serah terima jabatan di kantor BPIW, Jakarta, Kamis (4/6). Serah terima dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris BPIW sebelumnya, Firman H. Napitupulu kepada Sekretaris BPW baru, Iwan Nurwanto yang disaksikan langsung kepala BPIW, Hadi Sucahyono.

Selanjutnya, Firman H. Napitupulu menjabat Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusat 1), Tris Raditian sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Pusat 2). Kuswardono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II (Pusat 3) dan Manggas Rudy Siahaan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III (Pusat 4). (ris/infoBPIW)

Sebanyak empat pejabat pengawas (eselon IV) dan tiga pejabat fungsional ahli di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dilantik Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono di Jakarta, Rabu (1/7).

Empat pejabat pengawas (eselon IV) yang dilantik, yakni Heru Edhi Wibowo, SE, M.Eng. MURP sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Rima Lelowati, S.AP, M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Dra. Endah Trisuprasetyaning Widowati, sebagai Kepala Sub Bagian Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, dan Shovich S. AP, MAP sebagai Kepala Sub Bagian Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. Kemudian tiga pejabat fungsional yang dilantik adalah Dr. Dita S.N.A Diliani S.Sos, M.Si, Sinta Nur Aini, ST, MT dan Mutri Batulaini, S.Hum, M.T. (ris/infoBPIW)

## **Kepala BPIW Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional**



## MENYUSURI ORA BEACH

*Maldivesnya  
Indonesia*

Sumber: Istimewa



**S**urga tersembunyi di wilayah timur Indonesia ini, memiliki pasir putih dengan air laut yang jernih nan biru. Kekayaan biota laut di perairan di sekitar Pantai Ora juga masih terjaga dengan baik, jadi kalian dapat melihat berbagai jenis terumbu karang cantik dan ikan-ikan yang berenang bebas di sekitarnya. Pemandangan di sekitar Pantai Ora juga sangat cantik. Pantai Ora ini terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Meskipun tidak masuk dalam 5 kawasan super prioritas, akan tetapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian

dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk Maluku antara lain pembangunan sektor jalan trans maluku sepanjang 914 kilometer, penataan kawasan strategis dan juga pembangunan rumah susun untuk para nelayan. Bagi anda yang tertarik untuk menikmati keindahan bak maldives, berikut terdapat beberapa panduan yang dapat dijadikan sebagai referensi jika kalian akan berlibur di Pantai Ora Maluku Tengah:

**LET'S GO!!**

## TRANSPORTASI



Menggunakan Pesawat  
**Jakarta-Ambon**

(Maskapai: **Batik Air** (direct)/**Garuda Indonesia** (direct)/**Lion Air** (transit))



**3 Jam**  
(Direct)

- Bandara Pattimura Ambon - Pelabuhan Tulehu  
**± 1 jam** (menggunakan mobil sewa seharga **200k**)
- Pelabuhan Tulehu - Pelabuhan Amahai  
**4 jam** (menggunakan speed boat, tiket **ekonomi 150k** dan **VIP 300k**)
- Pelabuhan Amahai - Desa Saleman  
**2 jam** (menggunakan charter mobil seharga **800k**)

## AKOMODASI



ADVENTURE

IS

OUT THERE

Nusa Nalan Beach Resort ★★★★★  
(Harga permalan **Rp 600k**, jarak dari pantai **2 km**)

Pasir Putih Guesthouse ★★★★★  
(Harga permalan **Rp 450k**, jarak dari pantai **3 km**)

Ora Sunrise View Resort ★★★★★  
(Harga permalan **Rp 700k**, jarak dari pantai **3 km**)

## AKTIFITAS WISATA



Salah satu segi budaya yang menarik adalah Kepulauan Seram dihuni oleh **penduduk suku Alifuru** serta suku asli lain seperti Hoaulu dan sebagainya.



Selain goa, pengunjung yang suka kegiatan outdoor juga bisa **berkemah** di area pantai ini. Di wilayah pinggiran pantai yang dekat dengan tebing. Pada malam hari akan ditemani suara ombak serta gugusan bintang.

Menikmati pemandangan **sunrise, sunset** dan **gugusan bintang** yang sangat cantik ketika berada sehari-hari di pantai ini.



Tidak hanya keindahan air pantai saja, bisa juga menikmati jelajah alam, dengan menjelajahi **goa** di Pantai Ora.

## KULINER



Mie sagu dengan ikan kering



Jus gandaria yang terletak di kota Masohi



Kuliner papeda



## TIPS MENUJU PANTAI ORA

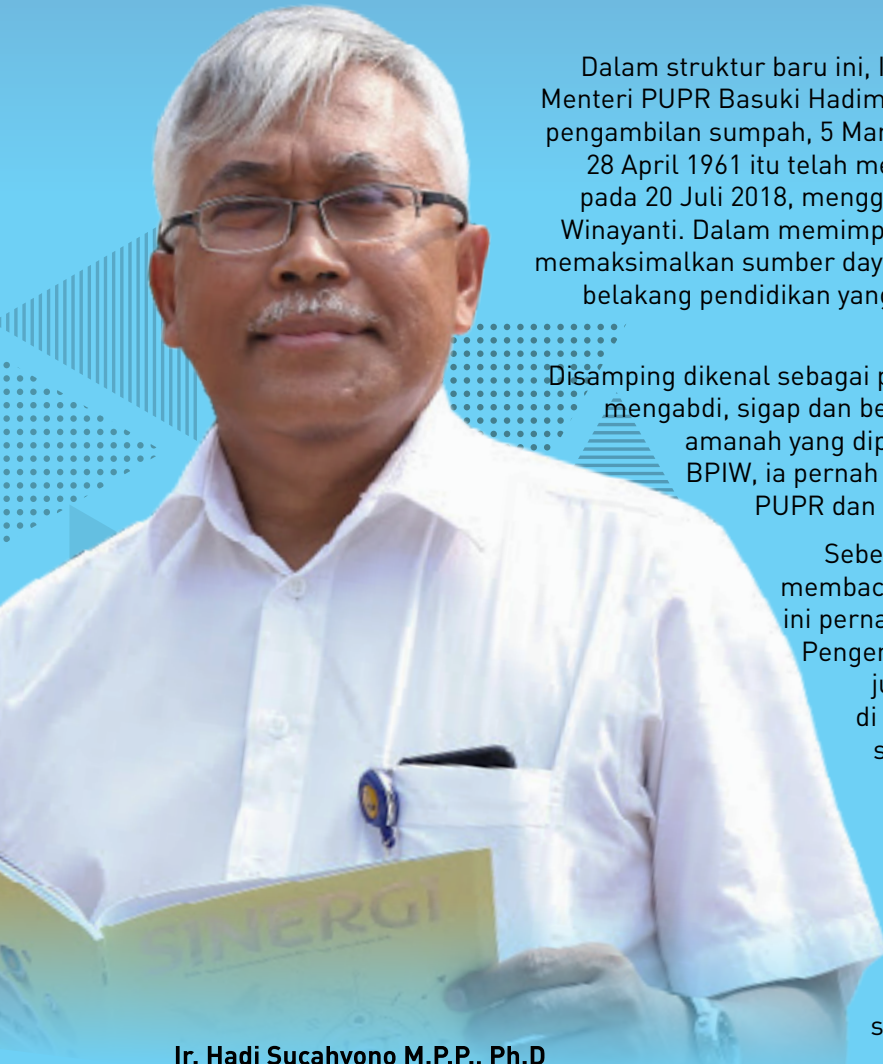
- Membawa bekal dari rumah karena di sekitar pantai ini tidak ada orang berjualan
- Gunakan Pelindung (**Sunblock**)
- Berhati-hati dan **tidak disarankan untuk berenang** karena bisa merusak karang laut
- Membawa sendiri peralatan snorkeling



# Sosok Para Pimpinan BPIW di Era Struktur Baru

**M**enteri PUPR Basuki Hadimuljono mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dalam Struktur organisasi BPIW yang baru ini penanganan perencanaan dan pemrograman sektor BPIW dibagi per wilayah, Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Perubahan struktur organisasi tersebut diiringi perubahan beberapa posisi pucuk terutama di sebagian Kepala Pusat dan Sekretaris. Seperti apa sosok mereka?. Berikut ulasannya.

## Jawab Kepercayaan Dengan Kerja Keras



**Ir. Hadi Sucahyono M.P.P., Ph.D**  
Kepala BPIW Kementerian PUPR

Dalam struktur baru ini, Ir. Hadi Sucahyono M.P.P., Ph.D kembali dipercaya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala BPIW pada pelantikan dan pengambilan sumpah, 5 Maret 2020 lalu. Sebelumnya, pria kelahiran Jakarta, 28 April 1961 itu telah memimpin BPIW sejak dilantik dan diambil sumpah pada 20 Juli 2018, menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIW, Lana Winayanti. Dalam memimpin BPIW, pejabat yang terkenal humoris ini selalu memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Baginya, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, SDM di BPIW dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan BPIW.

Disamping dikenal sebagai pejabat yang humoris, ia juga pekerja keras, loyal mengabdikan, sigap dan berupaya semaksimal mungkin dalam mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya. Sebelum menjabat Kepala BPIW, ia pernah menjadi Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.

Sebelum di BPIW, pria yang dikenal mempunyai hobby membaca dan suka menyaksikan pertandingan sepakbola ini pernah bertugas di Ditjen Cipta Karya sebagai Direktur Pengembangan Permukiman. Tidak hanya bekerja, Hadi juga menuntaskan pendidikannya hingga S3, yakni di *Ohio State University* di Amerika Serikat. Sebelum sekolah S3 di negara Paman Sam itu, ia mendapat tugas sebagai Pemimpin Proyek Permukiman di Kalimantan Barat.

Dengan kesigapannya, kini BPIW dikenal, tidak hanya di lingkungan Kementerian PUPR, tapi juga Kementerian/Lembaga lain. Namun suami Rita Yulianti itu tidak mau jumawa, baginya pencapaian saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan staf BPIW. Hadi pun siap untuk terus bekerja keras untuk menjawab kepercayaan memimpin BPIW dengan optimal.



## Mengawal Sekretariat BPIW Dengan Penuh Tanggung Jawab

Perubahan struktur organisasi BPIW membawa perubahan pada beberapa jabatan, termasuk posisi Sekretaris BPIW. Semula posisi tersebut ditempati Ir. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP. Pada pelantikan dan pengambilan sumpah 3 Mei 2020 lalu, posisi itu digantikan Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc, Sci. Nama Iwan Nurwanto tidak asing lagi di BPIW, karena sebelumnya ia menjabat Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Urusan pemrograman, sebenarnya bukan sesuatu yang baru baginya. Betapa tidak, Iwan yang lahir di Kediri, 29 Nopember 1963 itu, pernah menjadi Staf di Bina Program di Ditjen Cipta Karya pada 1 April 1996 hingga 31 Maret 2000.

Kemudian, ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Seksi Fasilitas Sistem dan Mekanisme Pembiayaan Pasar Primer dan Sekunder pada Maret hingga September 2000. Setelah itu, ia menjabat Kepala Seksi Fasilitas Sistem dan Mekanisme Pembayaran sekitar setahun. Selanjutnya, sarjana S2 *University of Birmingham* Inggris ini mengemban berbagai jabatan. Jabatan yang pernah dijalani dan berbagai pendidikan serta latihan yang pernah dilakukannya, menjadi bekal yang sangat berharga baginya untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretariat BPIW dengan penuh rasa tanggung jawab.



**Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc, Sci**  
*Sekretaris BPIW*

## Menuntaskan Masa Tugas di BPIW

Pada awalnya sebagai PNS, Firman Hatorangan Napitupulu menjadi Staf Dit. Tata Kota dan Tata Daerah Ditjen Cipta Karya 1985 hingga 1994. Kemudian, menjadi Staf Dit. Bina Tata Perkotaan dan Perdesaan Ditjen Cipta Karya 1994 hingga 2000.

Pada 2000-2001, suami dari Gita Chandrika dan bapak dari tiga orang anak ini, menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subdit Tata Ruang Wilayah dan Sistem Perkotaan, Dit. PRW. Setelah itu, berbagai jabatan ia jalani, termasuk menjadi Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR 2015-2017. Jabatan tersebut dilakoni tamatan S2 *University of Pittsburgh* Amerika Serikat itu, sebelum menjadi Sekretaris BPIW sejak 23 Mei 2017.

Jabatan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yang dijalani saat ini, akan menjadi jabatan terakhir. Pasaunya, pria kelahiran Bandung, 23 Oktober 1960 itu, akan memasuki masa purnabakti setelah mengabdikan diri di Kementerian PUPR lebih dari 30 tahun. Tidak hanya menjalankan pekerjaan rutin, lelaki berdarah Batak itu kerap memberikan berbagai masukan dan ide untuk Kementerian PUPR maupun BPIW. Hal itu dilakukannya sebagai wujud rasa cinta terhadap instansinya.

**Ir. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP**  
*Kepala Pusat Pengembangan  
Infrastruktur Wilayah Nasional*



**Tris Raditian, ST, MM**  
Kepala Pusat Pengembangan  
Infrastruktur PUPR Wilayah I

## Bermodal Pengalaman Berbagai Daerah, Siap Bekerja Maksimal

Di era struktur baru ini, dari lima eselon II yang ada, hanya ada satu dari luar BPIW, yakni Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Tris Raditian, ST, MM. Sebelum di BPIW, suami dari Ir. Kustiyah Rahayu Wihartati ini, menjabat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Ditjen Sumber Daya Air (SDA) pada 2020. Meski pekerjaan di BPIW berbeda dengan diembannya sebelumnya, namun hal itu tidak menjadi hambatan yang berarti bagi pejabat yang lahir di Aceh Tengah 23 September 1964 tersebut, karena ia langsung bisa beradaptasi dengan tugas baru yang diembannya.

Kemampuan beradaptasi ini bukan tidak mungkin, didapat dari pengalaman, ketika Tris beberapa kali berpindah daerah dan pekerjaan. Berdasarkan data dari Bagian Kepegawaian, sebelum bertugas di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian di Provinsi Banten, ia menjadi Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Ditjen SDA Departemen Pekerjaan Umum pada 2009 hingga 2011. Dari bumi Maluku, ia mendapat tugas menjadi Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Ditjen SDA di Batam, dari 2011 hingga 2013. Dengan berbekal beberapa pengalaman tersebut Tris berupaya untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan maksimal.

## Bahu-membahu Untuk Hasilkan Produk Berkualitas

Nama Kuswardono, sudah tidak asing lagi di BPIW. Betapa tidak, sebelum menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, suami dari Desfitriza yang dikenal kalem ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis periode 2018-2020. Bahkan pada 2015-2016 ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Tidak hanya berkutat di BPIW, pria kelahiran Sukoharjo, 12 Nopember 1962 ini juga pernah menjabat di beberapa tempat, salah satunya di Ditjen Penyediaan Perumahan pada 2016 sebagai Sekretaris. Di Direktorat yang sama, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Susun pada 2016-2018.

Saat masih ada Kementerian Perumahan Rakyat, ia pernah menjabat Kepala Pusat Pengembangan Perumahan 2010-2015.

Di Kementerian ini, ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran periode 2009-2010. Dengan bermodal pengalaman tersebut, maka bapak dua orang anak ini, sangat paham apa yang harus ia kerjakan dan bagaimana membangun tim yang solid. Dibawah kepemimpinannya, tim Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II bahu-membahu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan produk-produk BPIW yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.



**Ir. Kuswardono, MCP**  
Kepala Pusat Pengembangan  
Infrastruktur PUPR Wilayah II

## Bergerak Cepat Bina SDM

BPIW Kementerian PUPR berdiri sejak 2015. Di tahun itulah Manggas Rudy Siahaan mulai bergabung dengan BPIW melaksanakan tugas-tugas perencanaan dan pemrograman Kementerian PUPR tersebut. Sebelumnya, sejak 2012 ia menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Perindustrian dan Perdagangan. Pada bulan Februari 2013 ia dilantik sebagai Kepala Dinas PU DKI Jakarta.

Suami dari Dra. Diana Syafiartati mengawali karirnya di Kementerian PUPR sebagai Kepala Satker Pusat Pengembangan Kawasan Strategis 2015-2016. Pada 2016, pria kelahiran Jakarta, 17 Maret 1963 ini menjabat Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Selanjutnya, pada 2018, ia menjabat Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Pada 2019, Rudy menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menggantikan Agusta Ersada Sinulingga yang sudah memasuki masa purna bakti.

Di 2020 ini, bapak dari tiga orang anak ini dipercaya menjadi Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III yakni wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan perubahan struktur organisasi itu, maka SDM yang ada juga mengalami perubahan posisi. Rudy pun bergerak cepat dengan langsung memberikan arahan pejabat yang baru di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, agar SDM tersebut dapat bekerja dengan maksimal untuk memberikan produk yang terbaik berupa kebijakan, strategi, dan perencanaan berbasis pengembangan wilayah serta program yang akuntabel yang dapat diimplementasikan pada pembangunan infrastruktur PUPR di Wilayah Timur Indonesia.

**(Hendra Djamal)**

**Dr. Ir Manggas Rudy Siahaan, M.Sc**  
*Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR  
Wilayah III*



# — PUTUS

# PENYEBARAN COVID-19



**1**  
Bekerja dari Rumah  
(Work From Home)



**2**  
Belajar dari Rumah  
(Study From Home)



**3**  
Ibadah dari Rumah  
(Worship From Home)



**4**  
Tingkatkan Imunitas  
Tubuh



**5**  
Rajin Cuci Tangan



**6**  
Hindari Menyentuh  
Bagian Wajah secara  
Langsung



**7**  
Memakai Masker



**8**  
Hindari Interaksi  
Langsung



**9**  
Disiplin Menjaga Jarak  
(Physical Distancing)



**BPIW**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT